

**Analisis *Failed States* terhadap Libya Pasca
Kepemimpinan Muammar Qaddafi (2012-2016)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

Mayang Kesya

16323021

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS *FAILED STATES* TERHADAP LIBYA PASCA
KEPEMIMPINAN MUAMMAR QADDAFI (2012-2016)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MAYANG KESYA

16323021

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**ANALISIS FAILED STATES TERHADAP LIBYA PASCA
KEPEMIMPINAN MUAMMAR QADDAFI (2012-2016)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

26 Juni 2020

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

NIK. 123230101

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A

2. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A

3. Willi Ashadi, S.H.I., M.A





PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Mayang Kesya

No. Mahasiswa : 16323021

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis *Failed States* Terhadap Libya Pasca Kepemimpinan

Muammar Qaddafi (2012-2016)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagai mana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Juni 2020

Yang menyatakan,



Mayang Kesya

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk;

Kedua Orangtua

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, nasehat, perhatian, semangat, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini. Terimakasih telah senantiasa berkorban tenaga, pikiran bahkan materil selama penulis menjalani studi dikampus.

Adik dan Saudara

Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi yang selalu ingin menjadikan penulis lebih baik dan dapat bermanfaat bagi orang lain.

Sahabat

Terimakasih atas doa, dukungan, nasehat dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

البعثة الإسلامية
الابتداء اللاند

HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Its always seems impossible until it’s done.”

Nelson Mandela

“Life is not about a calm passage, It is about good landing”

Pak Hangga Fathana

“Bersyukurlah sebanyak banyak maka Allah akan memberikan lebih. Segala sesuatu menjadi mungkin saat diri kita memaksimalkannya. Believe in yourself and break your limit.”

Mayang Kesya

البعثة النبوية
الابتداء بالاندية

PRAKATA



Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah *Subhanallahu wa ta'alla* yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Sebuah rasa syukur yang sangat besar bagi saya selaku peneliti, karena atas rahmat dan hidayah Allah akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan saran, motivasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah setia mendukung dan memberi semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih Kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.A.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terimakasih Pak Hangga atas bimbingannya selama proses perkuliahan, atas segala ilmu dan motivasi yang telah diberikan.

Terimakasih telah menjadi sosok inspirasi bagi saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya buat, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A. selaku Sekretaris Prodi Program Studi Hubungan Internasional sekaligus dosen pembimbing akademik. Terimakasih Pak Enggar atas segala arahan, bantuan dan motivasi bapak yang telah diberikan. Saya meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Bapak Willi Ashadi, S.H.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala bimbingan, diskusi, waktu dan pemikiran yang diberikan sejak sebelum skripsi ini dibuat. Terimakasih sudah selalu memberikan motivasi untuk selalu menyelesaikan Skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak sebagai amal jariyah, *aamiin aamiin yaa Rabbal 'aalamiin*.
5. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang banyak sekali membantu penulis selama perkuliahan, memberikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman, serta nasihat yang tak dapat terhitung jumlahnya. Semoga kebaikan Bapak/Ibu dosen senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang baik.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa.

7. Ayah (Ferry Haryanto) yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan serta pengorbanan kepada penulis, memberikan semangat serta motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, memberikan support berupa moril maupun materil selama penulis menjalani Studi di Universitas Islam Indonesia.
8. Adik Andika Putra Haryanto, Aura Pelangi Ladesta dan Muhammad Fadli Ferdiansyah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk kakaknya mampu mengerjakan skripsi ini.
9. Wali saya (Eriyanti) yang senantiasa mendidik penulis hingga penulis menjadi seperti saat ini, memberikan doa, kasih sayang, dan bimbingan tiada henti, support moril maupun material hingga penulis dapat menyelesaikan Studi di Universitas Islam Indonesia.
10. Keluarga besar Kartodikromo yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis untuk menjadi putri bangsa yang membanggakan sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluargaku di Jogja: Ramadha Valentine, Anggi Rahmawati, Shafa Salsabilla, Zahir, Aditya Aldi, Rifqi Anugrah, Muhammad Fathli, Dianawati, Karina Dwimaghfira, Rafi Fadhil. Terimakasih sudah menjadi keluarga baruku selama dijogja, menjadi tempat berkeluh kesan, teman main dan belajar. Dukungan kalian memberikan kontribusi tak terhingga terhadap penelitian ini. Semoga kekeluargaan kita tetap selalu terjalin dengan baik. Sukses selalu untuk kalian semua, semangat meraih mimpi dan sampai jumpa dilain waktu.
12. Wiku Arieffianto Tetuko yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, bantuan, serta perhatian dalam pengerjaan skripsi dan kehidupan. Terimakasih

telah menemani dan berjuang bersama dan selalu mengajarku untuk selalu bersyukur.

13. Teman-teman fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa 2017/2018 atas dedikasinya kepada penulis untuk mengajarkan bagaimana cara berorganisasi, memberikan pengalaman berharga dan membantu penulis untuk lebih berkembang dalam kepemimpinan.
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata: Reza Nurfitri, Linda, Syahnaz, Fabian, Aulia, Yogo dan Ilham. Atas semangat dan dukungannya. Terimakasih atas kebaikan kalian yang telah memberikan penulis pelajaran hidup yang berharga, sukses selalu untuk kalian dan semoga bisa bertemu kembali dilain waktu.
15. Teman-teman HI UII angkatan 2016 senang bisa menjadi bagian dari kalian. Semoga silaturahmi kita bisa tetap terjalin dengan baik, sukses selalu untuk semuanya!
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk dukungan, semangat dan doanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga kalian semua mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

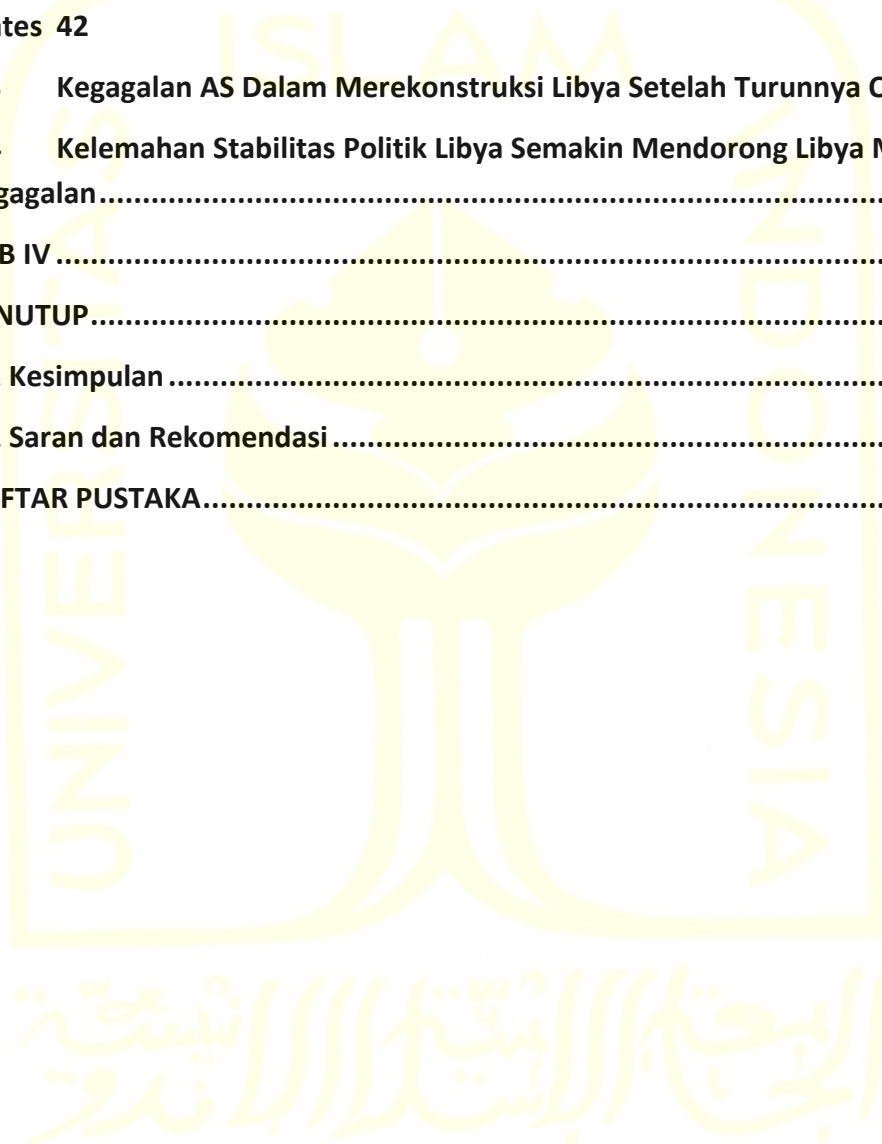
Yogyakarta, 26 Juni 2020

Mayang Kesya

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Signifikansi Penelitian.....	5
1.5 Cakupan Penelitian.....	6
1.6 Tinjauan Pustaka	6
1.7 Landasan Konsep/Teori/Model	11
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.8.4 Proses Pengumpulan Data.....	14
BAB II	16
KEADAAN NEGARA LIBYA PADA MASA KEPEMIMPINAN QADDAFI DAN SETELAH KEKUASAAN QADDAFI.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Libya Pada Masa Kepemimpinan Muammar Qaddafi	17
2.2 Kondisi Rakyat Libya Setelah Kekuasaan Qaddafi	23

2.3	Bentuk Intervensi NATO Untuk Menggulingkan Qaddafi dari Kekuasaannya	30
BAB III		36
ANALISIS LIBYA SEBAGAI NEGARA MENUJU KEGAGALAN DILIHAT MELALUI PERSPEKTIF FAILED STATES.....		36
3.1	Perspektif Failed States	37
3.2	Libya Sebagai Negara Menuju Kegagalan Melalui Perspektif Failed States 42	
3.3	Kegagalan AS Dalam Merekonstruksi Libya Setelah Turunnya Qaddafi 50	
3.4	Kelemahan Stabilitas Politik Libya Semakin Mendorong Libya Menuju Kegagalan.....	57
BAB IV		63
PENUTUP.....		63
4.1	Kesimpulan	63
4.2	Saran dan Rekomendasi	65
DAFTAR PUSTAKA.....		66



DAFTAR TABEL

Table 1: Pertumbuhan Perekonomian Libya Tahun 1984-2020

Table 2: Dinamika Pengangguran Rakyat Libya dari tahun 1999 hingga 2019

Table 3: Grafik Bantuan Amerika Serikat untuk Libya 2011-2016

Table 4: Dinamika GDP Libya Sebelum dan Sesudah Qaddafi



DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
DK	: Dewan Keamanan
ESL	: Economic Stabilization for Libya
GDP	: Gross Domestic Product
GNA	: Government of National Accord
GNC	: General National Congress
HAM	: Hak Asasi Manusia
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
LEE	: Libya Economic Empowerment
MEPI	: Middle East Partnership Initiative
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
NTC	: National Transitional Council
OPEC	: Organization of the Petroleum Exporting Countries
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
USAID	: United States Agency for International Development
USD	: United States Dollar
WB	: World Bank

ABSTRAK

Libya dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam minyak bumi. Selama 42 tahun (1969-2011) kepemimpinan Qaddafi, rakyat Libya tidak tersejahterakan bahkan cenderung berada dibawah tekanan. Peristiwa *Arab Spring* mendorong Libya untuk menuntut adanya perubahan. Gerakan pemberontakan berhasil menggulingkan pemerintahan Qaddafi, rakyat Libya berhasil menurunkan rezim Qaddafi dengan bantuan Amerika Serikat. Amerika yang memiliki kepentingan di Libya juga memberikan beberapa strategi untuk menata Libya menjadi negara yang mandiri. Namun, harapan untuk membawa Libya menjadi lebih sejahtera setelah kepemimpinan Qaddafi menjadi sirna, karena tidak adanya sosok pengganti yang dapat meredam gejolak kekacauan pasca turunnya Qaddafi. Kekosongan kekuasaan memicu rakyat Libya melakukan perang sipil dan menyebabkan kekacauan lainnya. Perang sipil antar suku di Libya memicu ketidakstabilan politik sehingga berpengaruh terhadap perekonomian negara. Perekonomian Libya pasca Qaddafi menjadi lemah hingga menyebabkan negara Libya masuk kedalam kategori negara gagal menuju ke keruntuhan. Skripsi ini akan menggunakan landasan konseptual *Failed Stated* untuk menganalisis bagaimana Teori *Failed States* memandang Libya sebagai negara yang menuju kegagalan?

Kata Kunci : *Libya, Qaddafi, United States, Failed Stated*

ABSTRACT

Libya was known as the rich country of its natural resources, especially oil. During 42 years of Qaddafi's government, the people of Libya aren't wealth enough, they are tend to be under pressure. *Arab Spring* has forced Libya to pursued the changes. The rebellion of the people of the Libya succeed to put Libya's government down. They could do this because of the help of United Stated. United Stated, who had the interest of this movement, gave Libya some strategies and advice to make this country better than before. But, the hope to bring Libya wealthier has gone because of there is no successor to redeem the chaos of the situation after Qaddafi's government. This empty of power trigged some Libya's factions to do the civil war and it caused the other chaos. This civil war in Libya made the politic situation unstable and it influenced to the country's economic side. Libya's economi after Qaddafi's government became weak and caused Libya turn into the failed stated. This paper use conseptual theory of Failed Stated to analyze *Failed States* saw Libya as a state to failure.

Key Words : *Libya, , Qaddafi's, United States, Failed Stated*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Libya merupakan salah satu negara di Kawasan Timur Tengah yang memiliki kekayaan sumber daya alam minyak yang berlimpah. Minyak bumi menjadi sumber utama pendapatan negara Libya. Pada masa pemerintahan Qaddafi, Libya tumbuh menjadi negara yang berkembang. Libya mampu memanfaatkan dan mengolah sumber daya alamnya dengan mandiri sehingga tidak bergantung pada negara negara asing. Pertumbuhan ekonomi Libya meningkat begitu pesat terlebih lagi ketika Muammar Qaddafi sebagai Presiden, hal ini dapat dilihat dari keberlangsungan hidup masyarakat yang mapan dan pembangunan infrastruktur yang baik (Lisa, 2009). Pada tahun 2006 Libya menjadi negara berkembang pertama di Afrika Selatan yang mendapatkan pendapatan produksi minyak dari negaranya sendiri. Bahkan minyak bumi Libya mampu menembus pasar Eropa.

Qaddafi merupakan sosok seorang pemimpin yang tegas. Presiden Libya ini memang mengurangi kerjasama dengan perusahaan asing (Craig Harris, 1986). Dengan kata lain Qaddafi tidak ingin negaranya di dominasi oleh asing. Pada awal kepemimpinan Qaddafi yaitu pada tahun 1970 Libya menjadi penghasil minyak terbesar dan menjadi incaran negara barat. Selama kepemimpinannya, Qaddafi dikenal sebagai sosok yang anti barat. Kebijakan anti kapitalis menyebabkan Libya jauh dengan negara barat terutama Amerika Serikat. Amerika Serikat dinilai memiliki tujuan ingin mendominasi dunia. Qaddafi juga menyusun

beberapa strategi agar Libya menjadi negara yang kuat dan disegani di mata internasional. Qaddafi berusaha membawa negaranya dari negara miskin menjadi negara yang kaya dengan perekonomian yang stabil. Libya mengalami masa kesejahteraan dikarenakan sumber daya alam minyak menjadi sumber pendapatan utama yang dikuasai oleh negara (Martinez L. , 2010).

Sejak awal Qaddafi menjabat sebagai pemimpin di Libya, Qaddafi mendapat banyak dukungan dari rakyatnya karena menjadi sosok pemimpin yang berkharisma. Qaddafi sebagai Presiden Libya yang anti barat, memihak kepentingan rakyat, dan mensejahterahkan rakyat Libya (Mansour, 2000). Qaddafi dinilai terlalu berlebihan dan otoriter dalam memimpin Libya sehingga rakyat menjadi tidak puas terhadap Presidennya. Pada tahun 2009 perekonomian mulai melemah, banyaknya pengangguran. Rakyat menganggap sebagian besar pendapatan hasil minyak masuk ke harta pribadi Qaddafi sehingga banyak rakyat menderita (Yon Machmudi R. H., 2016).

Sifat otoriter Qaddafi memberikan dampak baik bagi perekonomian di Libya. Secara tidak langsung Qaddafi ingin melindungi negaranya dari campur tangan asing. Pendapatan dari sektor minyak menjadikan Libya sebagai salah satu negara dengan pendapatan *Gross Domestic Produk* yang stabil. GDP Libya terus meningkat dari tahun ke tahun pada saat itu. Hal ini terlihat meningkatnya *surplus current account* Libya tahun 2002 sebesar USD \$14,08 miliar. (KBRI TRIPOLI, 2009) Namun kepemimpinannya Qaddafi yang otoriter justru mengakibatkan kehancuran bagi negaranya, perekonomian menjadi tidak terkendali (Bahauddin, 2012). Kebijakan dalam dan luar negeri yang dibuat sendiri oleh Qaddafi dan banyak merugikan rakyat, tidak ada lagi kebebasan hidup bernegara karena hak-

haknya sebagai warga negara dibatasi. Qaddafi tidak lagi mengedepankan kepentingan rakyat, kekayaan sumber daya alam Libya tidak lagi mengalir kepada rakyat dengan adil.

Rakyat Libya mulai tidak mempercayai pemimpinnya. Rakyat melakukan pemberontakan sebagai bentuk aksi protes seluruh masyarakat Libya atas penderitaan rakyat. Pemberontakan diawali dengan adanya aksi demo rakyat Libya karena ketidakpuasaan rakyat terhadap Qaddafi. Rakyat Libya memanfaatkan gejolak pemberontakan yang ada di negara Negara Arab saat itu, dikenal sebagai *Arab Spring*. Masyarakat Libya memulai langkah revolusi dengan berunjuk rasa pada tahun 2011 (Bhardwaj, 2012). Rakyat menuntut untuk memperoleh kebebasan, demokrasi dan kesejahteraan kepada rezim pemerintahan yang berkuasa. Tanpa diduga, Qaddafi melawan rakyat dengan menyewa pasukan dan memerintahkan untuk menembak mati yang menginginkan Qaddafi turun dari kepemimpinannya (Bahauddin, 2012). Kubu Qaddafi dan oposisi saling mengadu kekuatan, menggunakan senjata hingga terjadi banyak kerusakan infrastruktur.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia pun terjadi, dimana warga sipil maupun pasukan Qaddafi banyak yang meninggal dunia karena penyerangan dan kekerasan ini (Blanchard C. , 2012). Kemudian DK PBB tidak diam melihat konflik ini, melalui NATO mereka mengambil tindakan yaitu ikut turun tangan untuk membantu rakyat Libya dalam menurunkan rezim Qaddafi. PBB membantu rakyat dengan alih untuk melindungi rakyat dari kekerasan oleh pemimpinnya sendiri. PBB mengeluarkan kebijakan *Humanitarian Intervention* (Schumacher, 2014). Masyarakat Libya merasa terlindungi dan lebih bersemangat untuk menjatuhkan rezim Qaddafi. Dengan semangat yang kuat rakyat sekaligus

membunuh sang pemimpin yang sudah memimpin Libya selama 42 tahun pada tanggal 20 Oktober 2011. Masyarakat menganggap hal ini menjadi langkah baru dan menjadi harapan baru untuk Libya menjadi negara yang lebih baik dan demokratis. Namun pada kenyataannya, tidak mudah untuk merekonstruksi suatu negara pasca perang sipil. Situasi politik yang tidak stabil menjadi salah satu factor dari adanya perubahan ekonomi di Libya. Setelah berakhirnya Qaddafi dari kekuasaannya, Libya menjadi negara yang memprihatinkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai keadaan negara Libya setelah tewasnya Qaddafi dengan menggunakan sudut pandang *Failed States*. Maka penulis akan mengangkat sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana Teori *Failed States* memandang Libya sebagai negara yang menuju kegagalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan pada masa kepemimpinan Qaddafi dan sesudah kepemimpinan Qaddafi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keadaan ekonomi politik Libya setelah kepemimpinan Qaddafi.

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Libya sebagai negara yang menuju kegagalan melalui perspektif *Failed States*

1.4 Signifikansi Penelitian

Peristiwa *Arab Spring* yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2011 menjadi peluang bagi Libya untuk menggulingkan Qaddafi dari kekuasaannya. Rakyat Libya melihat negara tetangga melakukan pemberontakan terhadap rezim pemerintah yang diktator, sehingga rakyat Libya menginginkan hal yang sama. Pemberontakan terjadi karena rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Qaddafi dan jajarannya. Dengan adanya *Arab Spring* Rakyat Libya berhasil menggulingkan rezim Muammar Qaddafi, namun berdampak terhadap Libya sendiri. Sedikit banyak Qaddafi membawa dampak positif dalam mengembangkan negara. Rakyat menanggapi dengan turunnya Qaddafi akan menjadi harapan baru bagi Libya untuk hidup lebih sejahtera.

Penelitian ini akan berbeda dengan tulisan sebelumnya, tulisan ini menjadi kajian penting untuk dianalisis. Penulis akan melihat bagaimana Teori *Failed States* memandang Libya sebagai negara yang menuju kegagalan. Penelitian ini akan mengkaji apakah pemerintahan sementara yang dibuat oleh Amerika Serikat mampu mewujudkan keinginan rakyat Libya dan mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Penelitian ini juga menggunakan landasan konseptual *Failed States* untuk melihat bagaimana teori ini memandang Libya sebagai negara yang menuju kegagalan.

1.5 Cakupan Penelitian

Fokus penulisan ini adalah bagaimana *Failed States* memandang Libya sebagai negara yang menuju kegagalan. Berkurangnya kinerja Qaddafi sebagai pemimpin negara untuk menjadikan Libya negara yang sejahtera dan makmur membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah mereka. Setelah Qaddafi turun dari kepemimpinannya, keinginan rakyat menuju kehidupan yang lebih baik justru berbanding terbalik. Penelitian ini akan menjadi luas apabila tidak dibatasi, maka penulis akan membatasi penulisan ini yaitu dari bagaimana keadaan di Libya setelah berakhirnya Qaddafi dari kepemimpinannya. Penelitian ini akan dimulai dari tahun 2012 sampai tahun 2016, karena penulis merasa bahwa pada rentan waktu tersebut Libya sedang mengalami puncak krisis ekonomi.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk menelaah pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi. Tinjauan pertama mengenai keadaan Libya setelah jatuhnya Qaddafi yang berjudul "*After the Fall of Qaddafi: Political, Economic and Security Consequences for Libya, Mali, Niger and Algeria*" karya Ricardo Rene Laremont. Artikel ini membahas bahwa Muammar Qaddafi memang dibunuh oleh rakyatnya sendiri karena kediktatorannya. Kematian Qaddafi dan berakhirnya rezim ini memecah struktur keamanan dan perekonomian Libya yang telah dibangun oleh Qaddafi dengan sangat baik. Stabilitas Libya turun secara drastis. Gelombang pemberontakan yang terjadi di Libya justru membawa kehancuran dan masalah baru. Rakyat belum cukup mampu menerapkan sistem demokrasi. Hal ini

memberikan peluang kepada asing terutama Amerika Serikat untuk mengambil alih pemerintahan dan sumber daya alam. Intervensi negara barat memperburuk situasi Libya. Terjadi perang saudara dengan dua kubu bertentangan yaitu loyalis Qaddafi dan kubu oposisi yang mendirikan National Council Transition (NTC). Setelah turunnya rezim Muammar Qaddafi berdiri pemerintahan sementara, yang mengusahakan segala cara agar Libya dapat pilih. Namun yang terjadi adalah pemerintahan baru di Libya ini juga menambah situasi menjadi lebih buruk dari pada sebelumnya. (Laremont, 2013)

Tulisan lain menjelaskan mengenai Muammar Qaddafi selama menjadi Presiden di Libya adalah buku Yon Machmudi, Riyan Hidayat dan Elia Agustina. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana gejolak politik timur tengah dan menampilkan sosok pemimpin besar yang sangat berpengaruh di Timur Tengah yaitu Muammar Qaddafi. Qaddafi dikenal sebagai pembuat kebijakan yang reformis dan transformative dalam mengembangkan negara Libya. Kebijakan yang ia buat untuk melindungi negaranya dari asing namun justru membuat rakyatnya gerah karena menjadi tidak bebas dan sangat terbatas dalam beraspirasi. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan menimbulkan adanya keresahan yang kemudian menuntut adanya kebijakan untuk mengatasi krisis. Keterlibatan asing dalam proses penurunan Qaddafi dan peran Amerika Serikat melalui NATO dalam konflik Libya juga di jelaskan dalam buku ini. NATO menjadi kepanjangan tangan dari Amerika Serikat untuk mencapai kepentingannya dalam menanamkan pengaruhnya di Libya. Peristiwa *Arab Spring* menginspirasi rakyat Libya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahannya pada saat itu serta faktor asing

yang memperkuat dan semakin mengobarkan perlawanan rakyat Libya (Yon Machmudi R. H., 2016).

Kemudian tulisan mengenai profil Qaddafi dari sebuah buku yang berjudul *Menyingkap Perjalanan Hidup Tokoh Tokoh Diktator Kejam Dunia* oleh Ahmad Bahaudin. Buku ini membahas mengenai kondisi keluarga Qaddafi serta latar belakang pendidikannya. Keluarganya bagian dari suku Qadhafah yaitu sebuah etnis Arab yang dianggap tidak memiliki pengaruh apapun di Libya. Qaddafi mendapatkan pendidikan militer di Akademi Militer Kerajaan setelah menamatkan pendidikan menengah. Sejak saat itu Qaddafi mulai menanam benih idealismenya untuk menjadi penguasa Libya. Dengan bakat dan kharisma yang dimilikinya, ia terpilih menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata sekaligus ketua Dewan Komandi Revolusi yang memegang kekuasaan Libya. Qaddafi mulai menjadi penguasa Libya, setelah berkuasa ia mulai menutup pangkalan militer milik Amerika Serikat dan Inggris di Libya. Awal kediktatorannya dimulai saat ia mengusir orang-orang Italia dari Libya, mulai menunjuk keluarga dan teman-teman terdekatnya untuk menempati posisi penting di pemerintahan (Bahauddin, 2012).

Selanjutnya, dalam jurnal Lisa Anderson yang berjudul *(Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences Between Tunisia, Egypt, and Libya)* mengatakan bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahnya karena memang pemimpin mereka yang korups. Pengangguran semakin meningkat, dan ketidak efektifan sistem pemerintahan. Hal ini tidak hanya terjadi di Libya tetapi juga di Tunisia dan Mesir. Ketiga Negara ini mengalami tantangan yang berbeda dalam upaya menggulingkan pemimpinnya. Amerika Serikat tetap berada di

belakang rakyat (membantu) untuk memenuhi tujuannya dengan memahami kebutuhan setiap Negara karena penanganannya juga dilakukan dengan berbeda. Libya memiliki tantangan untuk merekonstruksi administrasi publik, pulih dari perang sipil, menstabilkan perekonomian pasca turunnya rezim Qaddafi, memperkuat masyarakat sipil melalui politik. Tunisia memiliki tantangan dengan memanifestasikan generasi baru, lapangan pekerjaan dan menerapkan system debat politik terbuka. Mesir memiliki tantangan harus mendesain ulang institusi mereka. Dengan berbagai tantangan yang dimiliki ketiga negara ini membuat Amerika Serikat semakin gencar dalam memperjuangkan kepentingannya yaitu mengambil keuntungan sumber daya alam sebanyak banyaknya. Keberhasilan rakyat Libya dalam menggulingkan kepemimpinan Qaddafi justru menimbulkan kekhawatiran soal masa depan ekonomi dan politik di Libya, rakyat Libya masih belum siap untuk mengelola sumber daya alam Libya membuat terjadi banyak kekacauan di negara ini dan menandakan gagalnya pemberontakan yang mereka lakukan (Anderson, 2011)

Sementara itu, Amerika Serikat berusaha memanfaatkan Libya untuk menambah pengaruhnya di Dunia Arab dan Afrika. Strategi Amerika tidak terbatas pada tujuan ekonomi melihat bahwa negara Libya terletak di kawasan yang strategis. Dalam jurnal yang di tulis oleh Robert Springborg mengenai ekonomi politik Arab belum cukup kondusif untuk demokrasi. Pasar ekonomi yang dipegang oleh rakyat juga membutuhkan peran pemerintah dalam mengelola perekonomian tersebut. Hal ini dilakukan agar sector swasta tidak memimpin industri. Industrilisasi dapat berjalan dengan baik apabila pemerintahan berjalan sebagai mana semestinya, pemerintahan yang buruk atau korup dapat

menimbulkan kekacauan di negara Arab. Pemimpin yang terlalu otoritarian semakin membuat rakyat gerah dan mencoba untuk berontak. Manajemen ekonomi semakin memperburuk situasi makro ekonomi struktural dan meningkatkan ancaman langsung terhadap kesejahteraan ekonomi di negara Arab. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap besarnya tantangan ekonomi apabila negara berkonflik. Terlebih apabila negara mengalami kekosongan kekuasaan, seperti yang terjadi di Libya. Setelah turunnya rezim Qaddafi kekosongan kekuasaan di negara Libya justru memberi celah terhadap Amerika Serikat terhadap sumber daya alam yang mereka miliki. Libya merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di Afrika, setelah Tripoli diduduki pemberontak harga minyak dunia dunia turun hal ini menandakan bahwa hanya untuk minyak (Springborg, 2011).

Tulisan selanjutnya, Craig Haris menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Libya Qadhafi's Revolution and the Modern State* bahwa Libya pada masa pemerintahan Qaddafi mengalami kesejahteraan karena sumber daya alam minyak dikuasi oleh negara. Kebijakan politik yang dibuat Qaddafi adalah kebijakan politik luar negeri anti barat dan pro-Arab, hal ini dilakukan agar membatasi masuknya perusahaan asing dan untuk memperat hubungan dengan negara Arab. Semakin hari Qaddafi semakin menikmati kekuasaannya, ia dianggap korup karena sudah tidak merata lagi perekonomian Libya. Akan tetapi keadaan ekonomi Libya masa pemerintahan Qaddafi masih cukup baik ketimbang perekonomian setelah turunnya Qaddafi dari pemerintahannya. Masuknya NATO ke Libya menjadi salah satu faktor menurunnya perekonomian Libya pasca turunnya Qaddafi, NATO memiliki kepentingan dengan sumber daya alam yaitu minyak bumi.

Kondisi Libya yang belum stabil setelah turunnya Qaddafi justru dimanfaatkan untuk mendapatkan perekonomian Libya melalui minyak bumi (Harris).

Berbeda dengan tulisan dalam tinjauan pustaka di atas, analisis dalam penelitian kali ini penulis akan melengkapi penelitian yang sudah ada. Belum ada tulisan mengenai keadaan perekonomian negara Libya pasca turunnya Qaddafi. Dalam tulisan kali ini, penulis akan fokus menganalisis mengapa kondisi perekonomian di Libya justru semakin memburuk setelah turunnya rezim kepemimpinan Qaddafi dengan menggunakan *Fail State* (Negara Gagal). Kemudian penulis akan melihat bagaimana bentuk intervensi yang dilakukan Amerika Serikat hingga berdampak terhadap perekonomian Libya.

1.7 Landasan Konsep/Teori/Model

Failed States merupakan sebuah Teori. Sebelum menjelaskan *Failed States*, terlebih dahulu dipaparkan mengenai konsep negara itu sendiri yaitu mengenai definisi, tujuan dan fungsi sebuah negara. Dalam menjalankan suatu negara, negara memiliki fungsi dan tujuan. Untuk melakukan *nation building* (pembangunan bangsa) untuk menjadi sebuah negara yang “ideal”. Negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan negara. Dalam pendekatan ini kita dapat melihat upaya sebuah negara, baik negara baru maupun negara *failing states* dalam membentuk dan membangun dirinya menjadi sebuah negara yang ideal. Keberhasilan *nation building* ini pada akhirnya menentukan apakah sebuah negara menjadi negara ideal atau menuju kegagalan yang berujung pada *failing collapse* (gagal runtuh)

dan akhirnya *failed* (gagal). Dalam pendekatan *nation building* terbagi dalam dua tahap yaitu tahapan internal yang dilakukan oleh negara itu sendiri dan tahap eksternal dengan menggunakan bantuan pihak ketiga atau asing.

Menurut Robert Rotberg negara dianggap gagal apabila terperangkap dalam konflik dan kekerasan internal berkepanjangan. Pemerintahannya kehilangan legitimasi atau pengakuan dari warganya. Rakyat terpecah belah sehingga sulit mendapatkan jalan tengah. Secara nyata tidak ada tolak ukur untuk melihat tingkat keberhasilan sebuah *nation building*. Pendekatan *Failed States* yang diusung oleh Robert, umumnya dideskripsikan pada suatu kondisi dimana negara sebagai penanggung jawab suatu bangsa dan wilayah tidak mampu memenuhi prinsip keadaban, kemanusiaan, ketertiban dan kesejahteraan bagi warganya (Rotberg, *When States Fail*, 2003). Negara dapat kehilangan kepercayaan atau kewenangannya dalam memerintah apabila tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan internal maupun eksternal secara efektif.

Negara dianggap sebagai aktor yang paling rasional yang paling bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsanya. Dalam melihat permasalahan yang terjadi di Libya, penulis menelaah bahwa Qaddafi sebagai kepala pemerintah tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Qaddafi dan jajarannya tidak mampu memberikan kecukupan akan pembangunan, penyediaan bahan dasar pokok, lapangan pekerjaan, dan pendidikan yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Qaddafi menjadikan Libya negara yang mandiri dengan perekonomian stabil di awal kepemimpinannya. Namun selama Qaddafi memimpin 42 tahun membuat Qaddafi terbiasa dengan harta kekayaan untuk dirinya sendiri. Rakyat tidak lagi diberi keadilan dan kebebasan, perlahan mulai banyak pengangguran. Pada

dasarnya setiap negara tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan pembangunannya.

Libya mulai mengalami krisis ekonomi, rakyat tidak lagi sejahtera. Rakyat mulai geram dan melakukan pemberontakan untuk menurunkan rezim Qaddafi. Pemberontakan dilawan oleh sang pemimpin, Qaddafi menyewa pasukan bayaran untuk menyerang rakyatnya. Konflik semakin memuncak dengan adanya campur tangan asing. Terlihat bahwa pemerintah Libya sudah tidak lagi menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu memelihara perdamaian, ketertiban dan ketentraman dalam negara serta melindungi hak dari setiap orang. Qaddafi dan jajarannya melupakan tanggung jawabnya sebagai otoritas tertinggi di Libya. Dari sini kita dapat melihat bahwa Libya dapat dikatakan menuju kegagalan dan dilihat melalui perspektif *Failed States*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat pentingnya data data dan juga analisis yang dapat menunjang tulisan ini guna menjawab bagaimana *Failed States* memandang Libya sebagai negara yang menuju kegagalan. Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap kata-kata tertulis. Penelitian nantinya akan dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan membaca beberapa sumber yang nantinya akan dicantumkan literature. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif agar interpretasi data lebih dalam untuk di analisa dan lebih mudah dilakukan. Disini penulis akan menelusuri dan

mempelajari berbagai dokumen, jurnal, buku, berita dan laporan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis (Sarwono, 2006).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu yang didalamnya melekat atau terkandung objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana keadaan rakyat Libya pasca berakhirnya kepemimpinan Qaddafi.

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Objek dari penelitian ini adalah Negara Libya, penulis akan menelaah dan melihat kondisi perekonomian Libya setelah kepemimpinan Qaddafi.

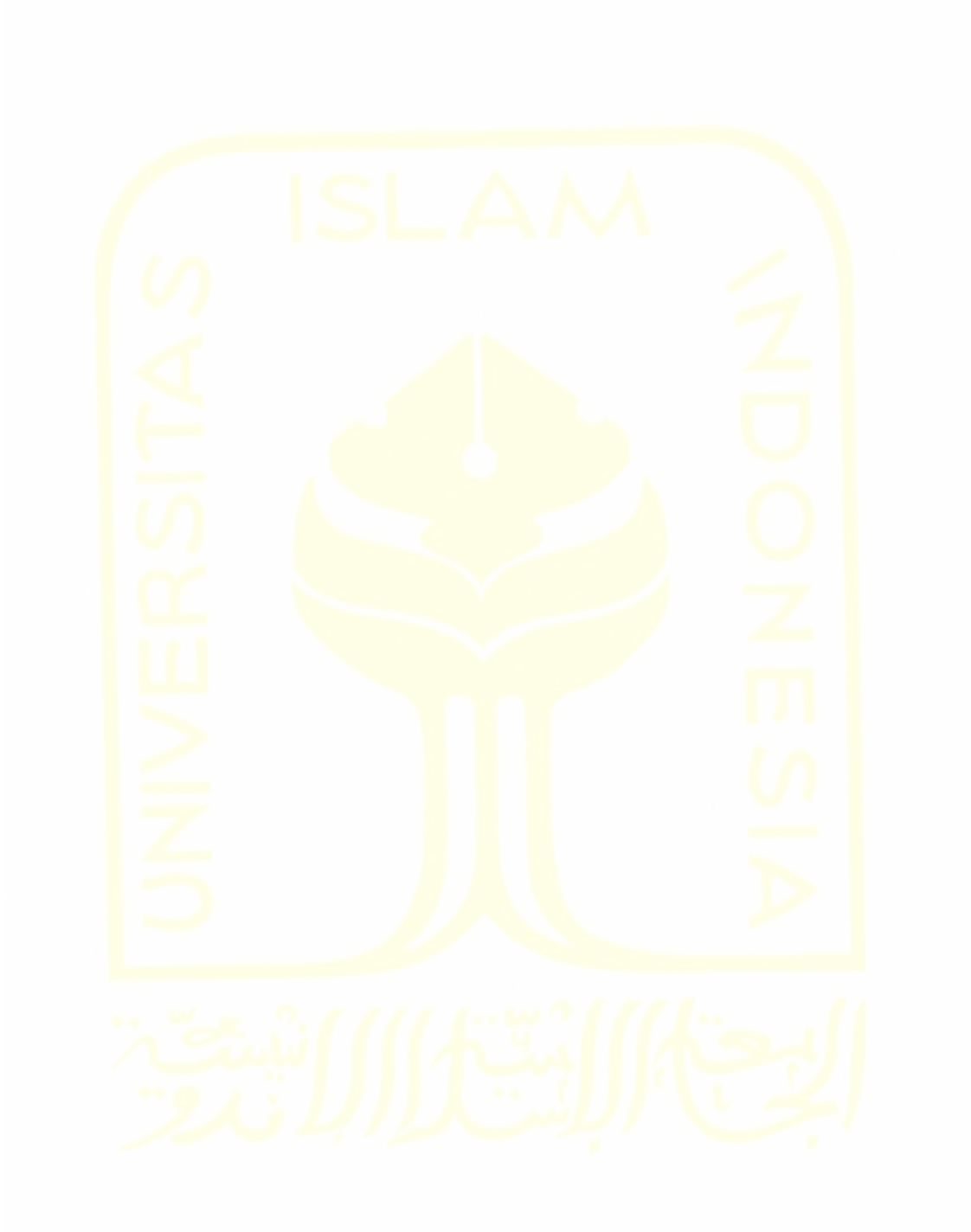
1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, artinya data atau tulisan yang berupa laporan dari penelitian orang lain dan diperoleh dengan mencantumkan data penulis. Penelitian ini akan mendapatkan data dari sumber yang dipilih dari berbagai media tertulis. Mencakup: majalah berkala, buku teks akademik, pernyataan resmi dari pemerintah dan publikasi. Pemilihan data akan didasarkan pada reputasi kredibilitas media dan penerbit.

1.8.4 Proses Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dimulai dari penulis akan menyusun asumsi dasar mengenai Libya. Membaca dan menelaah sejumlah literature untuk mengidentifikasi pernyataan atau argument terkait. Mengorganisir dan menyiapkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian. Penulis memulai pembahasan dengan menggambarkan masalah secara umum. Kemudian penulis akan menganalisa data yang telah didapat dan memaparkan secara khusus

bagaimana *Failed States* memandang Libya sebagai negara yang menuju kegagalan.



BAB II

LIBYA DI MASA KEKUASAAN QADDAFI DAN SETELAH KEKUASAAN QADDAFI

Setiap negara ingin mensejahterakan rakyatnya, tidak ada negara yang ingin negaranya didominasi asing. Meskipun pada kenyataannya tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri, dan tetap membutuhkan bantuan negara lain. Libya memiliki sumber daya minyak yang berlimpah, sang pemimpin Muammar Qaddafi ingin menjadikan Libya negara mandiri dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri sehingga hasil yang diterima sepenuhnya milik Libya. Sikap Qaddafi tidak manusiawi dalam memimpin Libya, keotoriterannya membuat rakyat Libya terpenjara. Rakyat Libya menghadapi tekanan dan kekejaman dari pemimpinnya sendiri (McDermott, 1973). Qaddafi menjatuhkan banyak korban demi mempertahankan kekuasaannya. Puncaknya saat adanya *Arab Spring* 2011 rakyat memberanikan diri melakukan demonstrasi untuk menggulingkan rezim Qaddafi. Dinamika perekonomian mulai dirasakan oleh rakyat setelah berakhirnya rezim Qaddafi.

Berlandaskan pada penjelasan yang telah dibangun dalam latar belakang. Libya dikenal sebagai negara yang menciptakan perekonomian yang mandiri. Hingga akhirnya sifat keotoriteran Qaddafi membuat rakyat ingin menggulingkan kekuasaannya. Rakyat Libya berhasil menggulingkan Qaddafi dan jajarannya dengan bantuan Amerika Serikat. Amerika sebagai polisi dunia tidak tinggal diam melihat adanya kekerasan yang dilakukan Presiden terhadap rakyatnya. Amerika Serikat mengerahkan segala strategi untuk membantu rakyat Libya menggulingkan Qaddafi.

2.1 Libya Pada Masa Kepemimpinan Muammar Qaddafi

Minyak menjadi sumber utama pendapatan negara Libya. Qaddafi mulai berkuasa di Libya pada tahun 1969, saat itu Libya masih menjadi negara miskin di Kawasan Afrika dan Timur Tengah. Semasa Qaddafi menjabat sebagai presiden, Libya merupakan salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi di Kawasan Afrika. Qaddafi menginginkan rakyat Libya memiliki kehidupan yang layak. Sejak 1980 Qaddafi telah melakukan berbagai peningkatan infrastruktur kesehatan. Minyak dan sumber daya energi menjadi bagian terbesar dari kehidupan rakyat Libya, menyediakan 95% dari pendapatan ekspor. Negara Libya juga memiliki cadangan minyak 44 juta barel, cadangan minyak terbanyak di kawasan. (Marston, 2011). Minyak dan gas bumi bersama sama menyumbang hampir tiga perempat dari pendapatan nasional. Pada tahun 2006 PDB Libya sebesar USD 62,36 miliar dengan penduduk 6.4 juta. Pendapatan perkapita mencapai USD 13.050. Qaddafi tidak ingin negaranya dirugikan sehingga ia tidak ingin Libya didominasi oleh pihak asing sejak awal kepemimpinannya. Qaddafi adalah seorang pemimpin yang tegas, beribawa dan disiplin ia menginginkan negaranya mandiri dengan mengolah sumber daya minyaknya sendiri (Fakih, 2000).

Setelah Qaddafi memimpin Libya ia mulai mengkaji ulang perundingan kontrak kerjasama dan membuat kebijakan baru. Qaddafi memikirkan sebanyak-banyaknya keuntungan yang bisa diperoleh. Qaddafi juga menutup pangkalan militer asing di Libya dan mengambil alih aset beberapa bank asing yang ada di Libya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi intervensi terhadap negaranya. Ternyata langkah ini berhasil membuat Libya menciptakan

perekonomian yang mandiri, sehingga Libya menjadi negara berkembang pertama yang mendapatkan pendapatan produksi minyak dinegaranya sendiri (David Blundy, 1987). Pada saat pemerintahan Qaddafi, Libya sangat dikenal sebagai negara yang mandiri dengan angka harapan hidup tertinggi di Kawasan Afrika. Libya dikatakan negara yang mandiri karena Libya tidak bergantung dengan negara lain terutama negara barat. Beberapa negara barat berkeinginan menanamkan modal di Libya karena menganggap Libya merupakan penghasil dan penyuplai minyak dengan kualitas yang bagus (Soeratman, 2012).

Kondisi minyak yang dihasilkan Libya memiliki nilai lebih untuk dijual, karena rendah belerang dan biaya produksi yang rendah. Sang pemimpin tetap teguh pada pendiriannya yang ingin membuat Libya tidak dicampuri dan didominasi asing. Sejak awal kepemimpinannya ia memutuskan untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri (Craig Harris, 1986). Qaddafi tidak bekerja sama atau tidak membuka peluang untuk asing menanamkan modal di Libya. Pada awalnya hal ini ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk melindungi negaranya dari banyaknya campur tangan asing akan sumber daya minyak yang mereka miliki. Hasil yang dicapai selama rezim Qaddafi sangat baik. Dibawah kepemimpinannya Libya bangkit membawa modernisasi di bidang politik, ekonomi dan juga teknologi. Selama kepemimpinan Qaddafi, pemerintah melakukan kontrol yang kuat terhadap ekonomi industri perminyakan dan organisasi industri negara mengelola sebagian besar industri lainnya (Otman, 2007).

Sejak awal Qaddafi menganggap bahwa, bangsa Eropa dan Amerika Serikat merupakan sekelompok orang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin

menguasai Libya. Qaddafi dengan jelas menegaskan bahwa tidak membutuhkan pemikiran dari demokrasi barat. Meskipun tidak dapat dipungkiri masyarakat Libya tetap membutuhkan perdagangan dan teknologi dari negara Barat (Farley, 1971). Qaddafi menerapkan beberapa kebijakan di Libya, salah satunya melarang adanya partai politik di Libya. Hal ini dilakukan agar Qaddafi tidak tergantikan sebagai pemimpin Libya. Qaddafi juga menerapkan kebijakan anti terhadap barat, kebijakan ini juga berdampak Libya menjadi dikucilkan di dunia internasional (Altajuri, 1999).

Muammar Qaddafi adalah seorang pemimpin yang membebaskan masyarakatnya dalam segi kehidupan yang layak. Qaddafi memberikan kebebasan untuk memakai dan mengolah tanah milik pemerintah kepada rakyatnya. Qaddafi memberikan tanah secara gratis untuk rakyat Libya. Qaddafi melakukan hal ini karena berprinsip bahwa tanah bukan milik perseorangan, setiap orang memiliki hak untuk menggunakannya demi kepentingan hidup. Sang pemimpin juga mempercayakan masyarakatnya untuk mengolah sumber daya minyak mereka. Pada tahun 2006 menurut Wall Street Journal, Libya merupakan negara dengan potensi sumber daya minyak terbesar di Kawasan Afrika pada saat itu. (Libya K. T., 2009). Libya tidak memiliki hutang luar negeri dan memiliki cadangan keuangan sebesar USD 150 miliar. Sebelum turunnya Qaddafi dari kepemimpinannya, Libya mampu memproduksi minyak sekitar 1.2 juta barel per hari. Dengan tidak adanya campur tangan asing, sehingga keuntungan yang didapat dari hasil minyak menjadi milik masyarakat Libya sepenuhnya. Pada awal kepemimpinannya, Qaddafi benar benar ingin mensejahterakan rakyat Libya dengan caranya.

Dibawah kepemimpinan Qaddafi, biaya Pendidikan dan perawatan kesehatan diberlakukan secara gratis untuk rakyat miskin di Libya. Tetap ada sekolah mahal dan biaya pengobatan yang mahal tetapi hanya untuk orang kelas atas. Qaddafi melakukan subsidi silang untuk menanggung masyarakat kelas bawah. Qaddafi menyediakan perumahan gratis untuk masyarakatnya yang tidak mampu, ia tidak ingin rakyatnya tinggal di jalanan (Ayub, 2016). Seperti yang kita ketahui bahwa Libya berada di daerah padang pasir meskipun begitu Qaddafi tetap ingin rakyatnya mendapatkan air bersih (Gwaambuka, 2016). Sebagai seorang pemimpin ia juga membuat proyek irigasi terbesar di Libya yang dikenal dengan nama *Great Man – Made River Project*. Irigasi ini dibuat untuk kepentingan Bersama, proyek sungai ini untuk menyediakan air bersih untuk seluruh masyarakat Libya. Dengan adanya irigasi sungai ini Libya memiliki masa depan pertanian yang cerah untuk memberi pangan bangsanya.

Qaddafi berusaha untuk mendirikan ekonomi yang produktif modern untuk membangun basis industri dan memulihkan perekonomian yang jatuh. Sang pemimpin ingin mengubah Libya dari negara terbelakang ke negara berkembang dengan caranya melalui minyak bumi sebagai sumber pemasukan negara (Hinnebusch, 1984). Peraturan yang Qaddafi buat untuk rakyatnya pada dasarnya tidak merugikan rakyat. Seperti bagi siapa yang memproduksi obat-obatan palsu akan dihukum mati. Bagi siapa yang menjual makanan kadaluarsa akan dikenakan denda yang sangat besar, penjualan alkohol pun dilarang keras. Dapat dilihat bahwa Qaddafi memang peduli dan menginginkan masyarakat Libya dengan layak (F.C, 1980).

Selain itu, pada masa kepemimpinannya Qaddafi ingin mewujudkan masyarakat Libya yang sosialis berdasarkan ideologinya (Sullivan, 2008). Menurut ideologi sosialis mampu membawa Libya menjadi lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. GDP Libya juga terus meningkat dari tahun ke tahun karena hasil dari sumber daya minyaknya dinikmati sendiri (Chamberlain, 2016). Pemerintahan yang dijalankan oleh Qaddafi memang bersifat otoriter, namun dalam segi pembangunan ekonomi, Qaddafi menjalankannya dengan baik. Apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Libya pada saat kepemimpinan Qaddafi adanya kenaikan GDP yang baik. Dengan gaya kepemimpinan Qaddafi yang otoriter, ia memiliki banyak musuh di dunia internasional. Meskipun Qaddafi tidak disukai banyak aktor penting internasional, ia tetap mampu mempertahankan stabilitas perekonomian di negaranya (Britannica E. , 2020) .

Libya dibawah kepemimpinan Qaddafi tidak sepenuhnya membawa kesengsaraan. Qaddafi memang membuat beberapa kebijakan yang secara langsung merampas hak kebebasan masyarakat Libya untuk berkembang. Masyarakat memang tidak memiliki hak pilih dalam berpendapat namun Qaddafi tetap memastikan masyarakat Libya memiliki standar hidup yang layak. Hal ini dilakukan Qaddafi untuk mengimbangi kebebasan masyarakat yang ia batasi. Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh Qaddafi membawa pengaruh besar terhadap rakyat, rakyat harus mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan. Keuntungan yang berlimpah membuat Qaddafi memiliki gaya hidup mewah dan ketergantungan akan kekuasaan dan juga kekayaan. Kebijakan yang dibuat oleh Qaddafi seringkali merugikan rakyat Libya dalam hal demokratis. Rakyat Libya

menilai Qaddafi berlebihan dalam menjalankan pemerintahannya, terlalu memaksakan kehendaknya dan tidak mempedulikan rakyat lagi seperti awal ia memimpin (El-Khawas, 1989).

Berbagai kebijakan dalam negeri maupun luar negeri dibuat dan ditetapkan oleh Qaddafi dengan tujuan untuk mempertahankan legitimasinya sebagai pemimpin tertinggi di Libya. Qaddafi membuat rakyat menutup mata akan pentingnya perpolitikan. Segala keputusan diambil dari dirinya sendirinya sehingga rakyat tidak pernah dilibatkan. Qaddafi mengendalikan segala aspek dinegaranya. Kebijakan politik diberlakukan untuk melarang adanya partai politik maupun organisasi dalam negaranya. Qaddafi tidak menginginkan adanya pesaing, ia tidak ingin dirinya turun dari kepemimpinannya. Segala upaya dilakukan Qaddafi untuk tetap menjadi pemimpin Libya meskipun tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat. Rakyat semakin terkurung dalam negaranya. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih, negara Libya makmur secara lahir namun miskin secara batin. Masyarakat merasa tidak mendapatkan kesejahteraan dalam hal kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat.

Rakyat merasa jenuh dan tidak berkembang, mereka ingin adanya perubahan. Masyarakat Libya tidak ingin dibatasi terus menerus. Langkah awal perubahan yaitu saat Peristiwa *Arab Spring*, rakyat memanfaatkan gejolak yang berlangsung di Kawasan Timur Tengah pada tahun 2011. Melihat negara tetangga hal serupa seperti Tunisia, Mesir, Yaman dan Irak berhasil melakukan revolusi meskipun dengan masalah yang berbeda beda (Anderson, 2011). Rakyat Libya tidak berhenti dalam aksinya untuk menggulingkan Qaddafi dari kekuasaannya

yang sudah berjalan selama 42 tahun. Konflik terus memanas hingga akhirnya rakyat berhasil menurunkan rezim Qaddafi sekaligus membunuh sang presiden tepat pada tanggal 20 Oktober 2011.

Kabar meninggalnya Qaddafi menjadi suka cita bagi masyarakat Libya, masyarakat menganggap turunnya rezim Qaddafi menjadi langkah awal dan harapan baru untuk membawa rakyat Libya pada kehidupan yang lebih baik. Namun kenyataan berbanding terbalik berakhirnya rezim Qaddafi perlahan mulai menimbulkan perpecahan dan masalah baru. Rakyat belum siap melanjutkan roda pemerintahan yang baru, sehingga negara Libya justru bergejolak setelah berakhirnya Qaddafi dari kekuasaannya.

2.2 Kondisi Rakyat Libya Setelah Kekuasaan Qaddafi

Selama masa kepemimpinannya, Muammar Qaddafi sangat mendominasi pemerintahan. Rakyat tidak pernah dilibatkan dalam hal mengurus pemerintahan di Libya. Rakyat mulai merasakan ketidakadilan pada tahun 2009 Libya sedang krisis ekonomi tetapi Qaddafi dan keluarganya tetap hidup mewah. Qaddafi melupakan tanggung jawabnya sebagai otoritas tertinggi, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan mendahulukan kepentingan rakyat. Sebagai seorang pemimpin di negara yang tidak didominasi oleh intervensi asing, Qaddafi memiliki banyak kesempatan untuk memanipulasi ladang minyak dan jaringan pemasarannya (Ricardo D. A., 2011). Sebagian besar dari keuntungan minyak masuk kedalam harta kekayaan pribadi keluarga besar Qaddafi dan sekutu dekatnya.

Krisis di Libya memuncak pada tahun 2010 dimana masyarakat Libya kekurangan lapangan pekerjaan dan kemiskinan semakin terlihat. Rakyat Libya mulai merasa tidak puas dengan pemerintahan Qaddafi. Demonstrasi dan pemberontakan dimulai tidak semata mata meminta Qaddafi untuk memberikan pekerjaan. Rakyat juga meminta diberi kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam menerima informasi dari luar Libya dan ingin berpartisipasi dalam pemerintahan Libya. Qaddafi sudah memimpin Libya selama 42 tahun, waktu yang sangat lama untuk periode kepresidenan. Rakyat menganggap Qaddafi memiliki waktu yang sangat lama dalam memimpin negara Libya. Qaddafi dinilai tidak mempresentasikan kepentingan rakyat dalam kebijakannya. Diposisinya yang strategis Qaddafi justru mempersiapkan anak anaknya dalam menjabat sebagai penguasa. (Chivvis, 2014).

Demonstrasi terus dilakukan rakyat guna menurunkan rezim Qaddafi yang dilakukan pada awal tahun 2011. Ternyata, Qaddafi menanggapi hal ini dengan kemarahan, ia menganggap bahwa rakyat telah mengkhiatkannya. Sehingga ia melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Qaddafi menyerang siapa saja rakyatnya yang menginginkan ia turun dari kepemimpinannya. Qaddafi bahkan menyewa tantara bayaran untuk menghabisi oposisinya, hingga menghilangkan banyak nyawa warga sipil. Serangan yang diberikan tim loyalis Qaddafi terhadap warga sipil yang tidak bersenjata dinilai sebagai bentuk kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (Vandewalle, 2012). Perang sipil yang semakin besar ini terlihat oleh negara lain dan mengundang perhatian internasional.

Setelah terjadi pemberontakan dan tewasnya Qaddafi, kondisi Libya menjadi tidak terkendali. Masyarakat belum mampu untuk membuat pemerintahan baru setelah berakhirnya rezim Qaddafi. Masyarakat sulit untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang telah rusak akibat konflik saudara. Pasca berakhirnya rezim Qaddafi, kondisi perekonomian Libya juga semakin kacau. Hal ini disebabkan karena kursi kosong pemerintahan Libya. Kurangnya orang berkompeten dan ahli dalam perpolitikan, minimnya pengetahuan dan wawasan rakyat mengenai pemerintahan yang membuat Libya belum memiliki pemerintah pengganti Qaddafi hingga tahun 2016. Kekosongan kursi pemerintahan ini justru menjadi awal perpecahan rakyat di Libya, terjadinya perebutan kekuasaan antar suku-suku di Libya. Setiap suku memperebutkan kursi kepemimpinan untuk membawa sukunya ketempat yang lebih baik (Tambaruka, 2011). Rakyat lebih mementingkan untuk menaikan suku mereka atau menggantikan posisi Qaddafi. Mereka lupa bahwa ada hal yang lebih penting dari sekedar sebuah jabatan, yaitu menstabilkan perekonomian dan bangkit pasca perang. Semenjak turunnya Qaddafi sebagai pemimpin rasa nasionalisme masyarakat di Libya sangat berkurang.

Setiap negara memiliki pedoman yang sama untuk menghitung GDP mereka. Setelah *Arab Spring* atau turunnya Qaddafi sebagai pemimpin Libya GDP negara mengalami penurunan sebesar 28% setiap tahunnya. Negara ini mengalami penurunan ekonomi. Faktor utama dari penurunan ini adalah dampak dari perang saudara dan implementasi pemerintahan sementara yang tidak stabil. Ketidakstabilan politik di Libya berdampak terhadap ekonomi politik mereka (consulting). Rakyat tidak mampu menjalankan atau melanjutkan pengolahan

minyak di Libya, perekonomian Libya semakin mengalami krisis sejak tewasnya Qaddafi. Dapat dilihat dari pendapatan sumber minyak Libya yang nyaris mencapai nol persen, mereka sangat bergantung pada minyak bumi sehingga pengeluaran minyak bumi menjadi sangat banyak dan tidak terkendali (Gaub, 2011).

Produktivitas masyarakat menjadi berkurang, rakyat Libya yang terbiasa menjalankan perintah kemudian menjadi tidak terarah. Rakyat menjadi kalang kabut dalam mengendalikan perekonomian Libya dan keadaan sosial dan politik. Rakyat belum memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik dalam melanjutkan roda pemerintahan (Serwer, 2011). Perubahan dari rezim otoriter pada transisi demokratis tidak lepas dari peran barat yang dominan. Ketidakstabilan politik tentu mempengaruhi keadaan perekonomian Libya, hingga berdampak terhadap kualitas hidup rakyat di Libya. Situasi politik menjadi salah satu faktor dari adanya perubahan ekonomi di Libya. Setelah turunnya Qaddafi dari kekuasaannya, rakyat berusaha untuk memulihkan perekonomian Libya dan berusaha membangun perekonomian di Libya yang rapuh dan tidak merata. Rakyat Libya mencoba membangun pemerintahan baru setelah Qaddafi diikuti dengan konflik saudara.

GDP maupun GDP perkapita di negara Libya yang terus menurun setiap tahunnya setelah Qaddafi, banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang membuat rakyat terus bergejolak. BERGEJOLAKNYA antar rakyat inilah yang membuat Libya keadaan di Libya semakin kacau balau. (David Cameron, 2011). Pendapatan hanya bergantung pada minyak bumi hingga penggunaan tidak terbatas. Setelah berakhirnya rezim Qaddafi, konflik antar rakyat terus berlanjut,

konflik ini dilator belakang karena memperebutkan kekosongan pemerintahan Libya (Chivvis, 2014). Setiap suku memperjuangkan sukunya untuk berada dikursi kosong pemerintahan. Upaya membangun kembali negara Libya terus dilakukan, namun belum ada yang berhasil hingga tahun 2016. Libya pasca Qaddafi secara politik dan administrative sangat lemah.

Rakyat Libya masih terpecah selama 5 tahun setelah tewasnya Qaddafi, kelompok bersenjata bertindak semaunya karena tidak ada yang mengontrol. Kesempatan untuk para pengambil kebijakan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyak untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ribuan orang hidup dibawah garis kemiskinan, rakyat Libya kelaparan dan tidak memiliki tempat tinggal di negaranya sendiri karena perang sipil. Setelah perang sipil 2011, menyebabkan banyak sekali kerusakan fasilitas public dan rumah penduduk. Rakyat mulai merasa tidak aman berada dinegaranya sendiri karena hadirnya para pemberontak baru untuk menguasai Libya (Erdag, 2017).

Dengan menurunnya produksi minyak di Libya maka pendapatan negara juga akan berkurang. Pemerintahan sementara di Libya juga belum stabil (Antonopoulos, 2015). Perlahan setelah Qaddafi tewas Libya mulai menjadi negara yang lemah, lemah secara fisik, geografis maupun kendala ekonomi mendasar. Kelemahan ini dapat membawa Libya menjadi runtuh sebagai negara, berbagai kekuatan politik dan kekuatan islam bersaing untuk menjadi satu satunya otoritas tertinggi Libya. Perekonomian Libya hampir tidak memiliki apa apa. Pemborosan akan penjualan minyak secara terus menerus menyebabkan mereka perlahan bangkrut.

Setiap tahunnya keadaan ekonomi politik Libya sangat jatuh, sekitar 2.5 juta rakyat Libya mulai membutuhkan bantuan kemanusiaan seperti pasokan air bersih, kebutuhan bahan makanan pokok dan perawatan medis. Sejak berakhirnya rezim Qaddafi, tidak ada lagi pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis justru sebaliknya banyak rumah sakit dan klinik yang tutup karena rusak dan bangkrut. Hampir 50% anak-anak di Libya tidak dapat bersekolah lagi. Sistem hukum hampir tidak berfungsi bahkan pengadilan di beberapa kota ditutup karena sangat berbahaya (Turkia, 2016). Beberapa masyarakat Libya berusaha keluar dari negaranya dan mengungsi ke negara lain untuk mendapat perlindungan.

Ketimpangan ekonomi semakin melebar, deskriminasi antar suku juga terlihat dari adanya pertarungan rakyat untuk menempati posisi di pemerintahan. Sampai tahun 2016 Libya tidak memiliki sosok pemimpin baru, setiap wilayah dikendalikan oleh kelompok bersenjata yang memiliki kekuasaan. Perpeperangan antar suku sangat terlihat, terlebih karena melemahnya kewenangan negara dan tidak ada otoritas yang dapat menghentikan peperangan. Politik di negara Libya tetap kontroversi, bergejolak dan ditandai oleh kekerasan. Status perekonomian Libya mengerikan pada tahun 2014 hasil ekspor minyak menurun dengan drastis sekitar 70% sejak 2011. Dunia internasional mulai melihat Libya menjadi negara yang gagal mendirikan pemerintahan yang baru setelah Qaddafi (Alloouche, 2017). Sampai dengan 2016 belum ada perbedaan yang signifikan setelah turunnya Qaddafi dari kekuasaannya. Perebutan kekuasaan menjadi masalah baru bagi Libya.

Demi mencapai titik tengah, masyarakat Libya menjalin kerja sama dengan NATO. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan mencapai keamanan yang

stabil di dalam negeri Libya. Rakyat dan NTC meminta NATO untuk tetap mendampingi Libya, meskipun Qaddafi sudah tewas mereka khawatir jikalau anak-anak Qaddafi yang masih hidup akan melakukan perlawanan terhadap rakyat sebagai bentuk balas dendam. Perdana Menteri Libya setelah turunnya Qaddafi yaitu Ali Zeiden melakukan kerjasama dengan NATO pada 22 Oktober 2013. Kemudian ditanggapi oleh Sekjen Anders Fogh Rasmussen bahwa mereka menyetujui untuk membantu Libya dalam menjaga keamanan. Anders juga mengatakan akan mendirikan institusi keamanan di Libya (Forscey, 2016). Sampai saat ini keadaan keamanan Libya dibawah pengawasan NATO. Rakyat mengikuti setiap saran dan masukan yang diberikan oleh NATO yang padahal merugikan Libya. Hal ini dikarenakan rakyat yang tidak ahli dalam bidangnya dan masih dalam tahap belajar menjalankan pemerintahan.

Intervensi asing ini akan menjadi masalah baru di masa mendatang. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan terlihat banyak sekali perubahan yang terjadi di Libya setelah berakhirnya rezim Qaddafi, tidak hanya berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Libya tetapi juga berdampak terhadap aspek kehidupan lainnya. Selama ini Libya dikenal dengan kebijakan anti barat dan tidak ingin berurusan dengan barat. Dengan meninggalnya Qaddafi membawa dampak positif bagi negara barat yang ingin menguasai sumber daya alam Libya (Edward, 2015). Terbukanya pintu gerbang untuk memasuki Libya yang selama ini tertutup karena kebijakan Qaddafi. Perlahan negara barat yaitu Amerika Serikat masuk dengan melakukan intervensi kemanusiaan dan memberikan pengaruh terhadap masyarakat Libya.

2.3 Bentuk Intervensi NATO Untuk Menggulingkan Qaddafi dari Kekuasaannya

Demonstrasi sebagai awal bentuk aksi protes rakyat terhadap pemerintahan Qaddafi kemudian menjadi perang saudara. Perang antar tim loyalis Qaddafi dan tim oposisi yang menginginkan Qaddafi turun dari kekuasaannya. Rakyat menginginkan adanya perubahan sistem dari otoriter ke demokrasi. Berawal dari rakyat melakukan protes damai pada 15 Februari 2011 tetapi justru mendapatkan perlawanan dari pihak Qaddafi dan menggunakan militer atas perintah Qaddafi. Gerakan protes ini semakin memuncak hingga akhirnya melibatkan seluruh rakyat Libya dan menjadi sebuah Gerakan pemberontakan yang bersifat anarki. Terbagi atas dua kubu, yaitu kubu loyalis Qaddafi dan oposisi yang menginginkan Qaddafi turun dari kekuasaannya. Kubu oposisi ini di jalankan oleh NTC (*National Transition Council*). Kedua kubu ini memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, baik dari kubu Qaddafi ataupun kubu demonstran anti pemerintah yang menginginkan Qaddafi turun. Aksi ini menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian Libya, (Davis, 2011).

Tidak seperti saat Ben Ali presiden Tunisia yang melarikan diri ke negara lain dan Hosni Mubarak presiden Mesir yang mengasingkan diri untuk meredakan suasana agar tidak semakin kacau. Tetapi berbeda dengan Qaddafi ia justru mengecam dan menganggap demonstrasi yang dilakukan rakyatnya sebagai aksi penghianatan. Qaddafi menghadapi dan melawan rakyatnya menggunakan pasukan bersenjata. Qaddafi tidak tinggal diam melihat sebagian besar rakyat Libya menyerangnya seperti aktivis, pengacara, pelajar dan pejabat pemerintah (Daalder, 2012). Mereka menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk

mengekspresikan diri melalui unjuk rasa damai tanpa mendapatkan ancaman kekerasan dari rezim yang sedang berkuasa. Qaddafi mengambil tindakan dengan mengerahkan tantara bayaran dari Chad dan Korea Utara. Hal ini dilakukan untuk menghabisi siapapun yang menginginkan Qaddafi turun dari kepemimpinannya (Ikechukwu, 2013).

Sikap Qaddafi yang melawan rakyatnya sendiri mengundang perhatian internasional. Qaddafi melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya, ia rela membunuh siapapun untuk bertahan pada kekuasaannya. Adanya pelanggaran HAM di Libya, membuat Amerika Serikat dengan bantuan PBB dan NATO melakukan intervensi untuk mencegah lebih banyak korban jiwa. Sebagai upaya untuk menghentikan serangan bersenjata Qaddafi dan menjaga keselamatan rakyat Libya (Kardas, 2001). Amerika Serikat melalui NATO tidak tinggal diam melihat perang saudara yang saling membunuh ini. PBB dan NATO merupakan perpanjangan tangan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki tujuan pendek yaitu menghentikan serangan bersenjata yang dilakukan oleh Qaddafi dan melengserkan Qaddafi dari kekuasaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Amerika adalah negara yang menjunjung tinggi hak universal terhadap rakyatnya. (House, 2011).

PBB sebagai organisasi internasional bertanggung jawab untuk melindungi rakyat dari kejahatan perang terlebih dari Presidennya sendiri. Dengan mengeluarkan Resolusi 1970 pada 26 Februari 2011. Resolusi ini berupa peringatan keras bagi Qaddafi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyerang rakyat Libya. Pelarangan penggunaan senjata bagi tim loyalis Qaddafi, embargo senjata, memberikan sanksi internasional dimana Qaddafi dan jajaran

dilarang pergi keluar negeri. Dan juga No Fly zone yaitu dilarang menerbangkan apapun diatas Libya. Karena NATO melihat Qaddafi melakukan pembunuhan massal melalui pengeboman menggunakan pesawat jet tempur. Ternyata resolusi 1970 ini tidak mempengaruhi tindak Qaddafi, ia tetap saja melakukan serangan senjata terhadap warga sipil.

Intervensi secara damai tidak berpengaruh bagi Qaddafi sehingga kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1973. Resolusi ini berupa melakukan segala langkah apapun yang diperlukan untuk menghentikan konflik atau kekerasan yang Qaddafi lakukan. Resolusi ini sudah bukan lagi berupa peringatan tetapi berupa tindakan. (Moore, 2007). Resolusi 1973 ini berisi membekukan seluruh asset Qaddafi dan jajarannya yang ada diluar negeri, membentuk tim perdamaian khusus di Libya dan *Humanitarian Intervention* yaitu tindakan intervensi kemanusiaan untuk menengahi masalah dalam negeri dengan menggunakan diplomasi atau militer (Kuperman A. J., 2013). PBB mengeluarkan kebijakan ini karena menimbang korban tewas akibat perang saudara dalam jumlah besar. Menurut Bikhu Parekh seorang pemerhati permasalahan politik dan sosial:

“Humanitarian intervention is an act of intervention affairs of another country with a view to ending the physical suffering caused by the disintegrations or gross misuse of authority of the state, and helping create conditions in which a viable structure of civil authority can emerge”

Dapat dilihat bahwa tujuan utama dari intervensi kemanusiaan ini adalah langkah untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam segala bentuk. (Parekh, 1997)

Resolusi 1973 juga memberikan legitimasi kepada Amerika Serikat, Prancis dan Inggris untuk memimpin pelaksanaan operasi militer atas dasar kemanusiaan. Serangan militer yang dilakukan NATO adalah melalui peluncuran lebih dari 110 rudal jelajah Tomahawk oleh USS Barry, USS Stout dan kapal selam Trafalgar milik Inggris selama bulan maret 2011 (Michaels, 2013). Pesawat Jet Tempur Typhoon dan Tornado milik *Royal Air Force* Inggris dan *Royal Canadian Air Force* dengan pesawat jet tempur F-18. Kapal perang dan pesawat jet tempur juga melakukan serangan udara untuk menyerang pangkalan pangkalan militer pasukan tantara bayaran Qaddafi. AS juga mengirim tiga pesawat B-2 *Spirit Stealth Bomber* untuk menghancurkan pertahanan militer tim Qaddafi (Dr. Ian Davis, 2011).

Serangan dilakukan NATO selama berbulan mulai maret hingga oktober. Hingga akhirnya menghancurkan kendaraan pengangkut logistic dan senjata perlahan mulai habis, serta seluruh akses jaringan kontrol Qaddafi. Rakyat Libya merasa terlindungi dan semakin bersemangat untuk menjatuhkan rezim Qaddafi. Hingga akhirnya tim loyalis Qaddafi terdesak dan Qaddafi tewas ditangan rakyat Libya pada 20 Oktober 2011 (Fakih, 2000). Tewasnya Qaddafi ditangan rakyat Libya membuat rakyat menjadi puas karena telah membunuh sang pemimpin. Hal ini memberikan harapan baru untuk membawa rakyat Libya pada kehidupan yang sejahtera. NATO membantu Libya keluar dari kekerasan yang dilakukan Qaddafi tidak tanpa alasan, NATO memiliki beberapa tujuan dan kepentingan yang berkaitan dengan minyak bumi Libya. Masyarakat sipil merasa lebih tenang dan aman dengan bantuan NATO. Namun disamping itu tanpa disadari NATO juga

memanfaatkan kondisi rakyat Libya yang tidak stabil karena perang saudara guna memperebutkan kekosongan pemerintahan (Ulfstein, 2013).

NATO perlahan memberikan pengaruh bagi kehidupan Libya terutama mengenai sumber daya minyak bumi yang dimiliki Libya. NATO sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab atas kemanusiaan ini diisi oleh negara-negara yang memiliki *super power* seperti AS, Inggris, Tiongkok, Rusia dan Prancis. Sebagaimana diketahui, anggota NATO yang berisi negara-negara maju sangat membutuhkan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka (Nmoma, 2009). NATO tidak pernah dibiarkan dalam hal mengambil kebijakan, semua atas persetujuan AS. Tindakan NATO untuk melindungi warga sipil berada dalam perintah AS dan hanya menjalankan sesuatu sebagai amanah. Terlebih apabila kebijakan militer yang dijalankan NATO akan menimbulkan dampak secara internasional (News, 2012)

Dalam intervensi yang dilakukan NATO di Libya tidak hanya sekedar menyelamatkan warga sipil. Hillary Clinton yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris negara Amerika Serikat mengatakan bahwa *“Now, we cannot and must not attempt to impose our will on the people Libya, but we can and must stand with them as they determine their own destiny. And we have to speak with one voice in support of a transition that leads to that time. We agree with the Arab League that Qaddafi has lost the legitimacy to lead”*.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa AS melalui NATO memang memiliki tujuan dan kepentingan yang lebih besar. Selain perubahan rezim, AS juga ingin menghidupkan nilai-nilai demokrasi di Libya (State, 2013). Intervensi yang dilakukan NATO belum menciptakan kestabilan ekonomi dan membentuk

Libya menjadi negara yang lebih baik. Belum ada keberhasilan yang signifikan selain berhasil menurunkan rezim pemerintahan Qaddafi. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan terbukti dengan adanya intervensi asing ini justru membuat kondisi Libya menjadi semakin buruk (Kuperman A. J., 2014).

Setelah turunnya rezim Qaddafi, proses pemulihan ekonomi Libya tidak berjalan lancar, pembangunan pemerintahan sementara juga tidak berjalan efektif bahkan cenderung semakin terpuruk. Proses politik yang tersendat mempengaruhi keadaan rakyat Libya. Hasil yang diberikan dari intervensi asing ini menimbulkan kekacauan, ketidakstabilan ekonomi dan politik serta perang saudara. Keadaan di Libya ini dapat kita analisis melalui pendekatan *Failed States* yang di usung oleh Robert Rotberg, dimana Libya sebagai negara tidak mampu bangkit setelah berakhirnya kepemimpinan Qaddafi. Perekonomian yang melemah, meningkatnya pertumbuhan penduduk, tidak adanya lapangan pekerjaan, kriminalitas yang merajalela membuat negara Libya dapat dikatakan sebagai negara menuju kegagalan.

BAB III

ANALISIS LIBYA SEBAGAI NEGARA MENUJU KEGAGALAN DILIHAT MELALUI PERSPEKTIF *FAILED STATES*

Melalui pembahasan pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai keadaan Libya saat kepemimpinan Qaddafi dan keadaan rakyat Libya setelah berakhirnya Qaddafi dari kekuasannya. Gerakan pemberontakan yang dilakukan rakyat Libya yang mendapat perlawanan dari rezim Qaddafi membuat AS melakukan intervensi kemanusiaan untuk membantu rakyat Libya keluar dari kekerasan sang pemimpin. Setelah tewasnya Qaddafi, rakyat mulai merasakan bahwa pemberontakan yang mereka lakukan tidak menjadi jalan keluar untuk hidup lebih baik. Rakyat Libya tidak mampu menjalankan pemerintahan pengganti Qaddafi. Kekosongan kursi pemerintahan di Libya membuat rakyat terpecah belah, setiap suku ingin menempati kursi pemerintahan. Keadaan politik dan ekonomi di Libya menjadi tidak stabil karena adanya konflik saudara yang terus berlanjut hingga tahun 2016.

Intervensi dengan menggunakan militer yang dilaksanakan oleh Amerika terlihat sangat ambisius, hal ini mengindikasikan bahwa memang adanya hal yang lebih penting dari sekedar intervensi kemanusiaan. Libya tidak memiliki sosok pemimpin baru pengganti Qaddafi sehingga membuat keadaan rakyat Libya terpecah belah, karena memperebutkan posisi Qaddafi. Rakyat tidak pernah dilibatkan dalam menjalankan pemerintahan, mengelola sumber daya alam dan menstabilkan perekonomian. Sehingga rakyat Libya terbiasa dengan menjalankan perintah dari pemerintah. Maka dari itu penelitian ini dirasa paling cocok dianalisis menggunakan pendekatan Teori *Failed States*. Untuk melihat

bagaimana *Failed States* melihat Libya sebagai negara yang menuju kegagalan. Penjelasan lebih lanjut mengenai analisis Failed Stated yang terjadi di Libya akan dibahas pada bab ini.

3.1 Perspektif *Failed States*

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa penelitian akan ini menggunakan pendekatan *Failed States*. Pendekatan ini merupakan alternatif yang ditawarkan oleh Robert Rotberg. Menurutnya, kebangkitan dan keruntuhan di negara bangsa bukanlah hal yang baru di era modern, negara bangsa membentuk legitimasi dunia dalam rangka mencegah perpecahan. Dalam bukunya yaitu *When States Fail* Robert melihat bahwa negara-negara gagal cenderung sering berkonflik, berbahaya untuk rakyatnya dan terbelah oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Robert Rotberg menyatakan bahwa sebuah negara dapat dianggap gagal apabila memiliki 3 indikator ini, yaitu:

1. Pemerintah kehilangan legitimasi
2. Jatuhnya GDP perkapita
3. Perang sipil berkelanjutan

Pertama, Pemerintah kehilangan legitimasi karena rakyat sudah tidak lagi mempercayai Presiden dan jajarannya. Rakyat tidak lagi menerima dan mengakui Presidennya sebagai otoritas tertinggi. Secara mendasar suatu negara dianggap sebagai negara yang kuat ketika rakyat mengakui pemimpinnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi serangan dari luar maupun dari dalam negeri. Ketika rakyat sudah tidak lagi mempercayai para pejabat negaranya untuk melindungi mereka, maka secara tidak langsung negara tersebut menjadi lemah.

(Rotberg, 2003). Ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahnya biasanya disebabkan oleh berkurangnya kinerja pemerintah untuk negaranya. Presiden dan jajarannya sudah tidak lagi memberikan kontribusi mereka untuk negara. Pemerintah dan rakyat bersama-sama memiliki kewajiban untuk menguatkan stabilitas negara.

Kedua, adalah jatuhnya nilai GDP pendapatan perkapita disetiap tahunnya. GDP dan GDP perkapita merupakan dua hal berbeda, dimana GDP diambil keseluruhan rakyat dinegaranya. Namun GDP perkapita ialah pendapatan perorangan disuatu negara. GDP menjadi salah satu tolak ukur terhadap perekonomian disuatu negara yang sedang mengalami pertumbuhan atau penurunan. Negara gagal biasa menampakan secara keseluruhan GDP yang mengkhawatirkan dan perkembangan rasio keuangan yang memburuk dari tahun ke tahun. Bahkan perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin benar-benar terasa nyata (Robert, 2003, hal. 6-7). Perekonomian suatu negara dianggap stabil jika tingkat pengangguran rendah dan upah meningkat. Apabila suatu negara menunjukkan perekonomian yang lemah maka negara tersebut sedang menuju kegagalan dengan melalui proses yang panjang.

Ketiga, perang sipil berkelanjutan. konflik antar saudara yang terjadi terus menerus akan mengganggu perdamaian dalam negeri dan negara sekitar. Perang sipil hanya biasanya disebabkan oleh perpecahan antar kelompok untuk berkompetisi. Perang sipil berkelanjutan merupakan karakteristik negara gagal menurut Robert, kenyataan benar bahwa adanya kekerasan berawal dari pertentangan antara rakyat dengan pemerintahnya sendiri. Kondisi negara yang sering berkonflik biasanya rentan terhadap kriminalitas. Kekerasan terjadi saat

kewenangan negara melemah dan tidak ada otoritas yang mampu untuk menghentikan konflik. Negara lebih berpotensi menuju kegagalan apabila pemerintah sudah tidak lagi mampu menjalankan aktifitas kenegaraan dengan semestinya (Robert, 2003, hal. 8-9).

Negara gagal biasanya memiliki ciri-ciri institusi mereka telah cacat. Artinya, para pejabat negara hanya duduk di institusi legislatif untuk menjalankan fungsinya sebagai mesin stempel. Apapun yang diminta oleh Lembaga eksekutif selalu dituruti tanpa ada *check and balances*, tidak terdapat debat yang bernuansa demokratis. Rakyat menyadari bahwa mereka tidak bisa berharap banyak kepada peradilan, terlebih dalam kasus melawan pemerintah. Birokrasi di negara gagal melemah dan tidak dihargai karena semata untuk memperjuangkan kepentingan pribadi bahkan tidak berpihak kepada rakyat. Bertentangan dengan negara kuat, negara-negara yang gagal tidak bisa mengendalikan perbatasan negara mereka. Mereka kehilangan kewenangan atas bagian wilayah mereka sendiri.

Pemerintah di negara gagal biasanya tidak lagi menyediakan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan dan tidak mementingkan kerusakan fasilitas. Korupsi merajalela dan justru dilakukan oleh Lembaga yang sebenarnya memiliki tugas pokok melindungi rakyat, mengelola uang rakyat. Pejabat di negara-negara gagal biasanya juga bekerja sama dengan para mafia, teroris ataupun preman guna mencapai kepentingan mereka. Negara gagal juga tidak mampu menjamin keamanan rakyatnya, padahal keamanan adalah tanggung jawab utama seorang pemimpin. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kesalahan elit kepemimpinan yang membuat hancurnya suatu negara.

Robert mengatakan, bahwa saat ini kenyataannya banyak negara lemah justru terdiri dari negara kaya. Maksudnya, negara kaya bukan berarti negara yang kuat. Apabila sebuah negara kaya tidak dapat mengelola konflik internalnya maka negara tersebut menjadi lemah. Negara yang lemah lebih mudah bergerak menuju kegagalan. Pada dasarnya, negara tersebut terlihat kuat, akan tetapi sebenarnya negara ini lemah karena konflik internal. Negara lemah dengan mudah berpotensi menuju ke kegagalan. Lemah secara geografis, fisik atau kendala ekonomi yang mendasar. Negara-negara lemah biasanya rentan terhadap isu agama, bahasa atau konflik antar etnis. Jaringan infrastruktur di negara tersebut memburuk karena adanya konflik internal.

Menurut Robert, negara gagal mudah dikenali dengan jaringan infrastruktur yang buruk atau hancur. Semakin rusak jalan raya maka semakin negara tersebut menunjukkan kegagalannya. Fasilitas publik menjadi semakin menurun dan diabaikan. Guru-guru, ahli fisika, perawat-perawat dan petugas fasilitas umum selalu dibayar lambat atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Buku pendidikan dan kesehatan menjadi langka. Mesin X-ray dirumah sakit rusak dan tidak diperbaiki. Kebanyakan dari layanan publik berada dibawah kualitas sesungguhnya. Minat baca masyarakat menjadi jatuh, tingkat kematian bayi meningkat dan penyakit Aids merajalela. Negara gagal adalah negara yang tidak mampu memenuhi persyaratan dan tanggung jawab dasar suatu pemerintahan berdaulat.

Robert Rotberg beranggapan bahwa tidak ada satupun tanda yang menunjukkan negara gagal berhasil melewati kegagalannya. Seperti, Lebanon dan Nigeria yang telah sembuh dari potensi keruntuhan tetapi sekarang menjadi

negara lemah. Afghanistan dan Sierra Leone berhasil bangkit dari potensi keruntuhan, namun sekarang menjadi negara gagal. Potensi untuk menjadi gagal atau runtuh sangat nyata bagi negara-negara yang sering berkonflik. Suatu negara dapat berpotensi menjadi gagal apabila tidak dapat menyelesaikan konflik (Robert, 2003, hal. 12-13).

Dalam bukunya Robert juga mengatakan apa yang dimaksud dengan negara gagal di abad ini, seperti Afghanistan, Angola, Burundi, The Congo, Liberia, Sierra Leone dan Sudan. Ketujuh negara ini adalah bukti nyata dari negara gagal. Somalia adalah negara runtuh, mereka menjadi negara yang gagal dan runtuh sampai saat ini. Kelompok negara lainnya menuju ke kegagalan dari lemah ke runtuh kemudian jatuh. Bencana alam yang tak terlihat atau perang yang dibuat oleh manusia bisa membawa populasi penduduk ke jurang kemiskinan. Saat populasi masyarakat kehilangan pendapatan, mereka juga akan kehilangan tempat tinggal bahkan dipaksa untuk menjadi pengungsi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pandangan Robert Rotberg mengenai *Failed States* dirasa paling tepat untuk melihat Libya sebagai negara yang menuju ke kegagalan. Melalui pendekatan *Failed States*, dapat melihat keadaan Libya setelah berakhirnya Qaddafi dari kepemimpinannya.

3.2 Libya Sebagai Negara Menuju Kegagalan Melalui Perspektif Failed States

Libya merupakan sebuah negara dengan kekayaan sumber daya alam minyak dan satu satunya negara yang dapat mengelola SDA sendiri tanpa campur tangan asing. Kekayaan SDA yang di miliki Libya membuat pihak asing menaruh harapan untuk dapat bekerja sama. Kekayaan sumber daya alam ini justru memicu berbagai konflik internal maupun eksternal (Jazeera, 2011). Minyak bumi merupakan sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan dinegara-negara barat, hal ini memberikan keuntungan yang besar bagi negara Libya sebagai negara penghasil minyak dengan kualitas yang bagus.

Perang sipil yang terjadi di Libya pada tahun 2011 membuat perekonomian dan kualitas hidup rakyat di Libya menurun secara drastis. Perang dan konflik antar suku yang terjadi tentu saja berdampak terhadap merosotnya stabilitas negara. Dari awal proses penurunan Qaddafi dari kepemimpinannya sampai tewasnya Qaddafi mengakibatkan ribuan orang tewas. Jumlah perkiraan berkisar 30.000 sampai 40.000 orang dengan mayoritas warga sipil (Abadie, 2003). Secara umum, kondisi negara pasca perang akan menghadapi dua tantangan, yaitu pemulihan kondisi ekonomi dan mencegah terjadinya kembali perang. Namun secara khusus, negara Libya memiliki tantangan yang berbeda, Libya tidak memiliki pemerintahan dan sosok pemimpin baru untuk membantu Libya menstabilkan ekonomi dan mencegah perang saudara berkelanjutan.

Minyak bumi Libya sudah tidak bisa diharapkan lagi, rakyat menjadikan minyak sebagai sumber pemasukan sehingga pengeluaran tidak terbatas. Rakyat menganggap tewasnya Qaddafi menjadi langkah baru dan menjadi harapan baru

untuk Libya. Nyatanya sangat tidak merubah sistem pemerintahan yang absolut ke pemerintahan yang demokratis. Rakyat harus menghadapi masalah baru, yang awalnya ingin memperbaiki Libya ternyata justru merusak sistem yang ada di negara tersebut dan justru memperkeruh keadaan (Collier P. , 1999). Kondisi Libya benar-benar berubah setelah terjadinya perang sipil. Menurut laporan bulanan Organisasi Negara Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada Februari 2015, Libya hanya mampu memproduksi 343 ribu barel pada akhir tahun 2015. Menurut laporan OPEC, Libya mengalami penurunan produksi minyak sebesar 70%. Penurunan hasil minyak juga disebabkan oleh teknologi di Libya yang rusak akibat perang sipil, sehingga membuat kualitas produksi minyak tidak maksimal dan menurun kualitasnya (KBRI, 2015).

Produksi minyak di Libya juga terus menurun dalam kurun 4 tahun terakhir dan hanya mencapai sekitar 0,38 juta barel per harinya pada tahun 2016. Jumlah pengangguran meningkat sebesar 19.57% dari total penduduk hingga menyebabkan sepertiga rakyat Libya hidup dibawah garis kemiskinan. Banyak infrastruktur yang hancur (Stankovska, 2011). Kondisi kehidupan rakyat di Libya menjadi semakin memprihatinkan, akses terhadap air bersih, kesulitan kebutuhan pokok, perumahan yang aman dan layanan medis menurun karena lebih banyak orang terlantar setelah perang (WorldBank, 2017). Setelah berakhirnya rezim pemerintahan Qaddafi, telah terjadi perpecahan politik dalam pemerintahan nasional Libya dan belum adanya kejelasan arah transisi yang akan membawa Libya menjadi lebih baik. Belum ada yang mampu menggantikan posisi Qaddafi hingga saat ini, pejabat pemerintah berusaha membangun kembali pemerintahan yang utuh dan normal.

Tetapi ternyata kekosongan kursi pemerintahan lebih menyita perhatian rakyat sehingga rakyat terpecah belah. Libya merupakan negara yang sangat beragam akan suku, keberagaman ini merupakan identitas yang selama ini berusaha dihapus oleh Qaddafi. Setiap suku di Libya merasa mampu untuk mengendalikan atau melanjutkan roda pemerintahan di Libya. Mereka berlomba-lomba membuat sistem pemerintahan yang memiliki *check and balance*, struktur pemerintahan yang sesuai dengan karakter bangsa dan pemerintahan yang kuat.

Seperti yang dikatakan oleh Robert Rotberg dalam bukunya "*When States Failed*" mengenai negara gagal, bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai negara gagal apabila memenuhi beberapa hal berikut ini:

1. Pemerintah kehilangan legitimasi
2. Jatuhnya GDP Perkapita
3. Perang sipil berkelanjutan

Berdasarkan pembahasan terkait kondisi Libya setelah perang saudara antara tim loyalis Qaddafi dan oposisi, maka penulis berpendapat bahwa Libya dapat dikategorikan sebagai negara yang menuju kegagalan karena sudah memenuhi kriteria sebagaimana yang dikatakan Robert.

Kriteria *pertama*, rakyat Libya sudah tidak lagi mempercayai Qaddafi dan jajarannya sebagai pemerintah. Libya dengan pertumbuhan perekonomian yang stabil dan kuat seharusnya mampu mensejahterakan rakyatnya, tetapi yang terjadi semakin menguatnya perekonomian di Libya semakin meningkat pengangguran dan kemiskinan. Rakyat sudah tidak lagi menerima dan mengakui Qaddafi sebagai sosok pemimpin yang berhak untuk memutuskan keputusan politik di Libya. Qaddafi melupakan tanggung jawabnya sebagai otoritas tertinggi di Libya

yang memiliki tugas utama menjaga keamanan negara, melindungi rakyat dan mengelola uang rakyat. (Ricardo D. A., 2011).

Dengan legitimasi yang diberikan rakyat Libya terhadap Qaddafi maka, pemerintah akan lebih mudah untuk memecahkan suatu masalah dan lebih mudah menguatkan stabilitas negara Libya. Rakyat Libya tidak akan melakukan pemberontakan apabila pemerintahan Qaddafi menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Kepercayaan rakyat terhadap Qaddafi dan jajarannya berkurang apabila pemerintah tidak lagi memenuhi kewajibannya. Pemerintah tidak lagi memberikan kinerjanya untuk membangun negara sehingga kinerja pemerintah berkurang. Populasi penduduk yang terus bertambah namun pekerjaan-pekerjaan baru tidak diciptakan Qaddafi.

Kriteria *kedua*, Jatuhnya GDP di Libya. GDP dan GDP perkapita di Libya mengalami penurunan yang drastis setelah turunnya Qaddafi dari kepemimpinannya. Ketidakstabilan politik di Libya membuat perekonomian Libya semakin merosot bahkan jatuh setiap tahunnya, kualitas hidup rakyat Libya juga menurun. Perekonomian Libya terus menurun setiap tahunnya sebesar 28% dan dapat dibuktikan dengan pendapatan minyak yang hanya mencapai 0,38 juta barel pada akhir tahun 2015 (Masoud N. , 2013). Libya semakin menampakan penurunan perekonomian yang mengkhawatirkan. Jumlah pengangguran juga meningkat sebesar 19.57% dari total penduduk hingga membuat sepertiga penduduk hidup dibawah garis kemiskinan.

Libya memiliki pertumbuhan perekonomian yang kuat, apabila mengingat Libya sebagai negara yang tidak didominasi oleh negara barat, sudah sepantasnya negara ini mampu mensejahterahkan seluruh rakyatnya dengan keuntungan yang

di hasilkan dari sumber daya minyak (WorldBank, 2020). Kenyataan memang tidak selalu sesuai dengan harapan, dengan tewasnya Qaddafi ditangan rakyatnya tentu saja membawa harapan baru bagi rakyat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi yang terjadi justru, infrastuktur banyak yang rusak, menurunnya lapangan pekerjaan, korupsi yang merajalela dan didominasi oleh para pengambil kebijakan, rakyat banyak yang kehilangan tempat tinggal akibat perang sipil, struktur hukum menjadi sangat lemah, peningkatan pertumbuhan penduduk (Ardiansyah, 2014).



Table 1 Pertumbuhan Perekonomian Libya Tahun 1984-2020

Setelah turunnya Qaddafi dari kepemimpinannya membuat rakyat di Libya bergejolak, bergejolaknya rakyat ini lah yang membuat tidak meredamnya perang saudara di Libya sampai tahun 2016. Hal ini tentu saja menyebabkan merosotnya GDP pendapatan perkapita di Libya (Masoed, 2014).

Kriteria *ketiga*, Perang sipil berkelanjutan di Libya membuat negara ini tidak memiliki pemerintahan baru hingga saat ini. Perebutan kekuasaan yang terjadi antar suku dan oposisi menimbulkan hadirnya kelompok-kelompok pemberontak

baru sehingga seringkali menimbulkan perang saudara. Setiap suku di Libya memiliki rasa tidak saling percaya antar suku lain untuk melanjutkan roda pemerintahan Libya (Garland, 2012). Setiap suku merasa memenuhi kriteria sebagai sosok pengganti Qaddafi dan jajarannya. Kondisi Libya setelah turunnya Qaddafi justru semakin tidak menentu ditandai oleh perang sipil bersenjata berkelanjutan.

Keadaan Libya yang lemah membuat dinamika politik dan ekonomi menjadi tidak menentu, hal ini memberikan peluang bagi negara barat untuk merebut kendali produksi minyak. Perubahan rezim yang terjadi di Libya tidak seperti yang diharapkan, kekosongan kursi pemerintahan yang menjadi awal pertarungan antar suku. Terlepas dari peperangan antar saudara di Libya juga di sebabkan karna minimnya pengetahuan, wawasan rakyat Libya mengenai pemerintahan. Keinginan rakyat yang awalnya ingin memperbaiki sistem pemerintahan otoriter ternyata justru terpecah belah (Blanchard C. M., 2011). Perang saudara yang terus terjadi hingga tahun 2016 juga menyebabkan banyak sekali kekacauan dan kerusuhan. Selain menghilangkan banyak korban jiwa, peperangan juga juga memicu tindak kriminalitas.

Meningkatnya kriminalitas di Libya merupakan sebab akibat dari banyaknya pengangguran dan peningkatan pertumbuhan penduduk sehingga rakyat melakukan tindak kejahatan atau kekerasan untuk bertahan hidup. Jumlah pengangguran yang meningkat sebesar 19.57% setiap tahunnya mempengaruhi sumber pendapatan dan kualitas hidup rakyat di Libya. Ketimpangan ekonomi yang melebar, deskriminasi antar suku dan jurang antara si miskin dan si kaya semakin terlihat jelas antar rakyat Libya. Membawa rakyat dalam kemiskinan dan

lebih terpuruk setelah berakhirnya kepemimpinan Qaddafi pada tahun 2011 (Economic, 2020).

Kekurangan pangan seperti kelaparan dan rendahnya tingkat pendidikan membuat rakyat Libya melakukan tindak kriminal, sehingga rakyat tidak berpikir panjang dalam melakukannya. Sebagian rakyat melakukan tindak kejahatan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan dirinya. Dengan cara pencurian, penipuan, penggelapan dana bahkan penganiayaan. Kriminalitas yang terus meningkat di Libya tentu saja membuat resah masyarakat lainnya, mengganggu keamanan dan kenyamanan di Libya. (Masoud N.).

Libya: Unemployment rate from 1999 to 2019

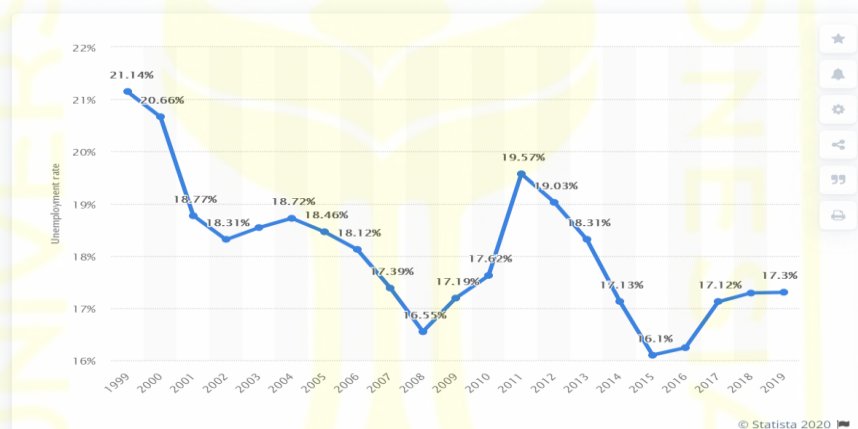


Table 2 Dinamika Pengangguran Rakyat Libya dari tahun 1999 hingga 2019

Menurut Robert perang sipil merupakan karakteristik dari negara gagal. Negara lemah akan menunjukkan ciri-ciri dari kegagalan, semakin lemah negara Libya. Semakin kelemahan itu cenderung untuk menuju sisi kegagalan bahkan dapat menuju ke kejatuhan. Libya melemah dan kemudian hancur karena persaingan antar suku untuk memperebutkan kekuasaan dan sumber daya minyak (Okey Oji, 2016). Dari tahun 2012 sampai pertengahan tahun 2016 pemerintahan

sementara Libya tidak membawa dampak yang signifikan yang akhirnya ikut melemah dan kekerasan kembali berlanjut. Kini Libya dihadapkan dengan kondisi yang lebih parah dari pada kondisi sebelum perang sipil, Libya berada diambang kehancuran bahkan dapat dikatakan sebagai negara yang menuju ke kegagalan (Brockmeier, 2016). Merubah sebuah negara dari otoriter menjadi negara demokrasi tidaklah mudah, jika gagal dalam satu hal, maka perubahan itu justru akan menjadi kekacauan yang tidak berujung.

Ketidakpastian ekonomi di Libya membuat para penguasa membuat kebijakan untuk memaksimalkan kebutuhan mereka sendiri dan menguatkan ekonomi serta politik kelompoknya. Terlebih apabila, Libya yang hingga saat ini belum memiliki pemerintahan dan arah kebijakan yang jelas membuat rakyat di Libya menjadi kacau balau (Guillermo O'Donnell). Kegoyahan Libya saat masa transisi hingga tahun 2016 benar membawa Libya menuju ke kegagalan. Setelah adanya perang sipil, potensi negara Libya untuk mengalami kegagalan akan semakin besar. Kegagalan tidak dapat dihindari terlebih jika masyarakatnya cenderung bersifat serakah. Keterpurukan ekonomi yang terjadi di Libya ini merupakan kegagalan dari pemerintahan Qaddafi dalam membuka peluang ruang ekonomi dan politik yang inklusif.

Dengan berbagai penjelasan diatas, Libya sudah masuk ke dalam kategori negara gagal dengan kriteria yang sesuai dengan yang dialami rakyat Libya melalui sudut pandang *Failed States* yang di usung oleh Robert (Rotberg, *When States Failed*, 2003). Kegagalan Libya untuk bangkit setelah turunnya Qaddafi dari kekuasaannya merupakan suatu proses yang panjang untuk akhirnya bisa menjadi negara yang gagal.

3.3 Kegagalan AS Dalam Merekonstruksi Libya Setelah Turunnya Qaddafi

Kekosongan kursi pemerintahan di Libya dapat dikatakan sebagai bentuk penyebab sekaligus pemicu konflik berkepanjangan. Keamanan suatu negara tidak hanya dalam pemahaman aman fisik. Tetapi juga meliputi seluruh kebutuhan hidup manusia seperti kebebasan beragama, berpolitik dan melakukan kegiatan ekonomi berjalan dengan normal. (Stiftung, 2009). Pemahaman rakyat untuk saling bekerja sama dalam membangun negerinya kembali pasca perang masih kurang, mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. AS melalui NATO yang melakukan intervensi kemanusiaan di Libya tidak diam saja melihat Libya berada di jurang keruntuhan. AS juga membantu Libya dengan melakukan beberapa upaya untuk membangun stabilitas politik dan ekonomi Libya. Pasca berakhirnya Qaddafi sebagai Presiden Libya, AS bertanggung jawab untuk menjadikan Libya negara yang mandiri. Sampai dengan tahun 2016 AS membuat pemerintahan sementara di Libya untuk melatih dan membangun pemahaman rakyat Libya mengenai pemerintahan (Vandewalle, 2006).

Government of National Accord ini dibuat atas inisiatif PBB yang disahkan pada 17 Desember 2015. GNA sebagai satu satunya otoritas eksekutif yang sah di Libya, di pimpin oleh Fayeaz al Seeraj. GNA dibuat dengan tujuan untuk mempersiapkan kembali pemilihan umum Presiden dan Parlemen yang baru. Kondisi pemerintahan sementara Libya yang baru masih lemah baik secara legitimasi politik maupun keamanan, kondisi ini diperparah dengan adanya pemberontak dari berbagai suku Libya. PBB sebagai organisasi yang menaungi seluruh bangsa didunia merasa bertanggung jawab terhadap negara yang runtuh.

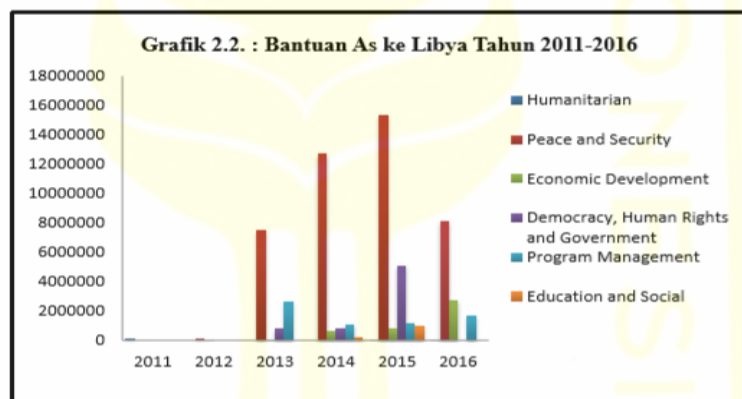
Sehingga mereka berupaya untuk mengembalikan pemerintahan negara yang runtuh tersebut agar stabil dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

PBB memiliki anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Prancis dan Rusia. Sebenarnya, Amerika Serikat memang memiliki kepentingan di Libya, yakni ingin menjaga stabilitas kawasan Benua Afrika dan Timur Tengah. Setelah tewasnya Qaddafi Libya dihadapkan dengan permasalahan baru yaitu terjadinya perpecahan politik dalam pemerintahan nasional Libya bahkan tidak adanya kejelasan arah transisi yang akan membawa rakyat Libya menjadi lebih baik. Libya membutuhkan dukungan AS dalam membangun kembali Libya. AS yang tergabung dalam NATO juga tidak hanya sekedar melakukan intervensi kemanusiaan, ada tujuan lebih penting dari pada bantuan kemanusiaan yaitu sumber daya minyak. Tetapi disisi lain, AS juga berkomitmen untuk membantu membangun institusi pemerintahan dan memperbaiki kehidupan rakyat Libya (Farrel, 2012). Dengan melakukan rekonsiliasi politik untuk meningkatkan kapasitas rakyat Libya dalam memerintah secara efektif melalui pengadaan pemilihan yang bebas dan adil.

Menurut Fukuyama, penggunaan kekuatan militer AS harus dilakukan dengan tujuan moral. Menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat memang penting tetapi bukan dengan secara langsung terlibat dalam urusan internal negara lain. Bentuk intervensi tanpa alasan mendasar dengan kekuatan militer bukan pilihan yang tepat. Hal yang sangat penting adalah menciptakan kondisi yang membuat masyarakat Libya merasa aman, bebas dan tidak tertekan. Penggunaan kekuatan militer hanya dilakukan secara bijaksana dengan membatasi penggunaan kekuatan militer. Intervensi pada suatu negara dapat dilakukan apabila

mengancam hak hidup warga negara. Hal ini menjadi strategi Amerika Serikat yang dilakukan dalam intervensinya di Libya agar masyarakat tetap merasa tenang (Fukuyama, 2006).

Keinginan AS untuk melepaskan rakyat Libya dari pemerintahan diktator dan memperbaiki kondisi Libya sungguh dilakukan dengan komitmen. Berbagai kucuran dana dan program dilakukan oleh AS sebagai bentuk komitmennya membantu membangun institusi pemerintahan dan memperbaiki kehidupan penduduk Libya (Hobson, 2016). Serangkaian bantuan dan program dilakukan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat Libya dalam menentukan nasib mereka sendiri.



Sumber : (Department Of State, t.t.)

Table 3 Grafik Bantuan Amerika Serikat untuk Libya 2011-2016

Mengingat selama kepemimpinan Qaddafi, masyarakat Libya terkurung dan minim pengetahuan. Dengan menggunakan berbagai kategori bantuan perlindungan dan solusi terkait kemanusiaan (Chesterman, 2011). Pertama, *peace and security* berupa stabilisasi dan operasi keamanan, penanggulangan konflik dan rekonsiliasi. Kedua, *economic development* yaitu berupa memberikan kesempatan ekonomi, meningkatkan daya saing sektor swasta, memperluas perdagangan dan investasi.

Ketiga, *democracy, human rights and governance* berupa pembentukan dan penegakan hukum serta Hak Asasi Manusia, membangun konsesus dan menciptakan pemerintahan yang baik. Keempat, *management* berupa pemberian bantuan biaya administrasi langsung untuk tata Kelola pemerintahan (El-Katiri, 2012). Kelima, *Education and social* pemberian bantuan melalui pendidikan melalui beasiswa dan layanan sosial. Pemberian bantuan dilakukan untuk mempromosikan dan memperkuat demokratisasi di Libya dalam berbagai sektor seperti keamanan, ekonomi, pemerintahan dan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mendukung agar proses demokrasi berlangsung secara efektif dan berkelanjutan, sehingga Libya dapat menjadi negara yang mandiri.

AS juga bekerja sama dengan *Middle East Partnership Initiative* (MEPI) guna mendukung transisi di Libya. Bantuan diberikan kepada partai politik agar menciptakan lingkungan yang kompetitif dan inklusif. MEPI berupaya mendorong Libya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat nasional dan lokal, membantu dalam memelihara masyarakat sipil yang dinamis serta mempromosikan supremasi hukum. MEPI juga memberikan pelatihan penyelenggaraan pemilu, pemberdayaan perempuan, pemahaman mengenai hukum dan perlindungan warga sipil (Glanville, 2013).

Sebagai upaya membangun tata pemerintahan untuk memperbaiki tata kelola Libya, Amerika Serikat berkoordinasi dengan *United States Agency for International Development* (USAID) yang merupakan sebuah badan pembangunan internasional. Amerika Serikat dengan bantuan USAID berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan rakyat Libya, mengenai konstitusi struktur dan praktik tata pemerintahan nasional melalui media sosial dan masa.

Amerika Serikat juga membuat program pembangunan ekonomi melalui USAID yaitu *Economic Stabilization for Libya* (ESL) dan *Libya Economic Empowerment* (LEE). Program ESL ini focus pada bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dalam manajemen keuangan, meningkatkan pengiriman listrik dan mempercepat penciptaan lapangan kerja. Sedangkan LEE lebih kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat Libya, terutama meningkatkan kemampuan kewirausahaan perempuan melalui pelatihan bisnis untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang sudah ada di Libya (Pattison, 2011). Pada kenyataannya, membuat pemerintahan sementara di Libya tidak mudah karena terdapat berbagai kelompok kepentingan yg juga ingin berkuasa (Blanchard C. M., 2018).

Perbedaan cara pandang terkait arah pembangunan Libya menjadi masalah yang kompleks, karena banyaknya struktur dan golongan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, ideologi dan kepentingan (Kailani-Chariat, 2017). Sehingga menyebabkan perebutan pengaruh dan kekuasaan yang membuat kondisi Libya semakin kacau. Setelah revolusi, situasi dinamika sosial dan politik di Libya dikelompokkan pada perbedaan kepentingan, identitas dan loyalitas. Sifat masyarakat Libya masih sangat tradisional dan didasari kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat. Perbedaan ideologi dan sosial budaya masyarakat sangat kurang dalam hubungan komunikasi antar sesama masyarakat lain di Libya. Berbagai perbedaan yang melekat dalam masyarakat Libya membuat konflik sipil terus berlanjut dan tidak ada jalan tengah (Clements, 2013).

Intervensi yang dilakukan AS juga ingin mendemokratisasikan negara Libya. Memperbaiki konstitusi Libya dari pengaruh militer, kelompok suku,

regional dan politik hingga proses transisi intitusi kelembagaan, sehingga dapat keluar dari keterpurukan. Persaingan dominasi antar kelompok yang telah di buat oleh Qaddafi lebih kuat untuk memecah belah antar kelompok di Libya (Sihbudi, 1998). Sulitnya Amerika Serikat meredam berbagai kelompok kepentingan tersebut membuat keinginan amerika dalam memperbaiki negara Libya tidak tercapai hingga saat ini. Perbedaan pendapat antar otoritas lokal dan nasional menjadi sumber paling kuat terjadinya konflik berkepanjangan selama proses transisi (Campbell H. G., 2012).

Keadaan yang selalu sama yaitu perang sipil justru membuat negara ini selalu kacau balau. Tidak peduli berapa banyak yang diberikan AS kepada Libya setelah tewasnya Qaddafi, rakyat tetap berfokus akan kekosongan kursi pemerintahan. Menurunnya produksi minyak dan sektor wisata membuat pemasukan negara berkurang (Khader B). Pengangguran meningkat, kriminalitas merajalela dan masyarakat hidup dalam kemiskinan. Kebijakan para pemimpin sementara Libya yang sahkan oleh NATO membuat negara ini menuju pemerintahan yang jatuh karena tidak adanya *chek and balance*. (Gosa, 2013). Kondisi ini dipengaruhi karena proses pemulihan atau pembangunan kembali perekonomian tidak berjalan dengan lancar. Proses perpolitikan Libya terhambat dan kurangnya keamanan rakyat akibat banyaknya perang antar kelompok.

Kondisi Libya setelah tewasnya Qaddafi semakin konfliktual karena perang saudara berkelanjutan. Perubahan rezim yang di usung oleh AS tidak membawa banyak perubahan terhadap Libya. Optimisme AS untuk membawa Libya menjadi lebih baik dan menjadi negara yang mandiri tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Obama yang pada saat itu Presiden AS menyatakan bahwa gagal

dalam membantu Libya menjadi negara yang lebih baik dan mandiri. Upaya AS dalam meredam konflik saudara di Libya juga gagal (Kuperman A. , 2015). Paham demokrasi yang dibangun AS tidak cukup kuat untuk membuat Libya benar-benar menegakkan nilai kebebasan. AS mengakui bahwasanya membantu Libya dalam membangun pemerintahan yang baru sangatlah tidak mudah dan memerlukan waktu jangka panjang.

Setelah adanya pergerakan gelombang *Arab Spring* AS memang menjadikan Libya sebagai sasaran penting karena SDA yang di miliki Libya. Ada urgensi yang lebih penting dari pada menyelamatkan warga Libya dari kekejaman Qaddafi. Masalah kemanusiaan yang terjadi di Libya bukanlah permasalahan HAM yang menjadi fokus utama AS. Justru pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Libya menjadi pembenaran bagi AS untuk melakukan intervensi. Selalu ada landasan strategis yang menjadi penguat Amerika Serikat dalam melakukan intervensi (Boose, 2012). Dengan berkecamuknya perang sipil antara berbagai kelompok bersenjata dan dengan keterlibatan AS didalamnya membuat stabilitas ekonomi dan politik Libya semakin kacau. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi Libya pasca perang sipil, kita dapat mengelompokkan Libya sebagai negara yang menuju ke kegagalan.

3.4 Kelemahan Stabilitas Politik Libya Semakin Mendorong Libya Menuju Kegagalan

Ketidakstabilan politik membuat pemulihan perekonomian dan pembangunan pemerintahan baru di Libya tidak berjalan dengan lancar. Stabilitas politik dan ekonomi di Libya terancam gagal, bahkan Libya juga gagal sebagai negara. Upaya AS membantu Libya bangkit yaitu dengan membuat pemerintahan sementara. Namun hal ini juga tidak menjamin adanya perbaikan perekonomian dan kondisi politik yang stabil. Situasi politik menjadi salah satu factor dari adanya perubahan ekonomi, karena bagaimanapun setiap aspek kehidupan dipengaruhi dari kebijakan politik. Libya mengalami penurunan perekonomian. Sektor pariwisata juga mengalami penurunan akibat kondisi keamanan yang semakin menakutkan karena perang. Pariwisata menyumbang 5% dari GDP negara, pada tahun 2004 jumlah wisatawan mencapai 149 ribu sampai 2007 mencapai 180 ribu yang mengunjungi Libya (Ricardo R. , 2013). Setelah perang sipil banyak negara yang melarang warganya untuk melakukan perjalanan ke Libya termasuk Indonesia. Hal ini karena konflik bersenjata dan kriminalitas yang merajalela. Cadangan dana di Libya menurun, pada tahun 2014 terkuras hingga USD 27 miliar (Martinez L. , 2015).

Krisis kemanusiaan menyerang Libya setelah berakhirnya Qaddafi dari kekuasaannya sehingga beberapa rakyat terpaksa untuk melakukan tindak kriminal. Banyak sekali masyarakat yang terpaksa harus mengantri berhari-hari untuk bisa menarik uang dari tabungannya agar dapat bertahan hidup. Para pegawai negeri mengambil 58% dari anggaran umum (Masoud N. M., 2013). Kondisi perekonomian Libya semakin hari semakin memburuk, dapat dilihat melalui GDP

perorang yang terus menurun hingga USD 4.539 juta. Inflasi semakin mengalami peningkatan sehingga menyebabkan harga semua komoditas terus meningkat, artinya nilai mata uang sudah tidak berharga lagi (Lynch M. , 2016). Diperburuk dengan kurangnya pasokan pangan, berkembangnya pasar gelap dan menurunnya nilai mata uang Libya terhadap mata uang luar negeri.

Fasilitas publik di Libya rusak dan diabaikan akibat perang saudara. Masyarakat Libya sudah tidak lagi memikirkan bagaimana membangun Libya kembali namun lebih kepada bagaimana mereka bisa berada di kursi pemerintahan. Guru-guru, perawat-perawat, pekerja-pekerja dan petugas fasilitas umum selalu dibayar lambat atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Buku pendidikan dan kesehatan menjadi langka dan membuat generasi selanjutnya semakin minim pengetahuan. Mesin X-ray dirumah sakit rusak dan tidak diperbaiki. Kebanyakan dari layanan publik berada dibawah kualitas sesungguhnya (Stuenkel, 2015). Kesempatan untuk dapat hidup lebih baik hilang bahkan memburuk, setiap harinya hukum hanya patuh terhadap kaum elit atau khususnya pengusaha yang memiliki banyak uang dan keterkaitan dengan oknum pemerintah Libya.

Libya menjadi negara yang rapuh dan tidak stabil sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *Failed States* bahwa sebuah negara lemah akan dengan mudah berpotensi bergerak menuju ke kegagalan. Menurut Robert, perang sipil merupakan karakteristik dari negara gagal. Negara lemah akan menunjukkan ciri-ciri dari kegagalan, semakin lemah negara Libya, semakin kelemahan itu cenderung untuk menuju sisi kegagalan bahkan dapat menuju ke kejatuhan. (Okey Oji, 2016). Dari tahun 2012 sampai pertengahan tahun 2016 pemerintahan

sementara Libya semakin melemah dan kekerasan terus berlanjut. Kini Libya dihadapkan dengan kondisi yang lebih parah dari pada kondisi sebelum perang sipil, Libya berada diambang kehancuran bahkan dapat dikatakan sebagai negara yang menuju ke kegagalan (Brockmeier, 2016). Transisi dari sebuah negara otoriter menjadi negara demokrasi tidaklah mudah. Jika gagal dalam suatu bidang, maka perubahan itu justru akan menjadi kekacauan yang tidak berujung.

Melawan korupsi di Libya, pengembangan sektor sumber daya manusia dan penguatan institusi publik merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus diatasi Libya setelah tantangan utama yaitu perang sipil. Kondisi pemerintahan membuat perekonomian Libya tidak stabil bahkan merosot pada jurang kegagalan. Kekacauan sistem pemerintahan sementara Libya membuat pemulihan ekonomi negara bukan prioritas utama, padahal kondisi ekonomi akan mengikuti bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan (Randall, 2015). Pemulihan perekonomian setelah perang sipil memakan dana yang besar dan waktu yang sangat lama. Pemerintah sementara Libya harus memberikan subsidi kepada rakyat karena kehilangan harta, tempat tinggal dan pekerjaan agar dapat bertahan hidup.

Infrastuktur yang telah hancur juga menjadi tanggung jawab pemerintah sementara untuk merekonstruksi kembali. Ketidakmampuan rakyat Libya dalam menstabilkan perpolitikan dan perekonomian negaranya membuat Libya terus mengalami kegagalan. Negara Libya dapat dikatakan sebagai negara yang gagal dengan menunjukkan *vacuum* nya kekuasaan dipemerintahan, hingga berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan (Lockwood, 2014). Beberapa alasan yang melatar belakangi masuknya posisi Libya sebagai negara yang menuju ke

kegagalan adalah sebagai berikut, ketimpangan ekonomi semakin melebar, setiap tahunnya perekonomian Libya makin terpuruk. Sepertiga rakyat Libya membutuhkan bantuan kemanusiaan seperti air bersih, pemenuhan pasokan makanan, perawatan medis dan tempat tinggal (Plecher, 2020).

Hal ini disebabkan oleh tidak ada lagi pelayanan kesehatan yang memadai, banyak rumah sakit dan klinik yang tutup karena rusak dan bangkrut (Sawani, 2012). Hampir 50% anak-anak di Libya tidak dapat bersekolah lagi. Sistem hukum hampir tidak berfungsi bahkan pengadilan-pengadilan di beberapa kota ditutup karena sangat berbahaya. Orang-orang yang dulunya pro terhadap Qaddafi ditahan selama bertahun-tahun tanpa dakwaan atau persidangan. Diskriminasi antar suku juga terlihat dari pertarungan mereka untuk menempati posisi di pemerintahan (Mohsin Khan, 2013).

Setelah perang sipil, Libya hanya mampu memproduksi 343 barel per hari pada tahun 2016. Tentu saja hal ini berdampak pada GDP perkapita setiap orang di negara Libya. Libya sudah tidak bisa lagi mengandalkan minyak sebagai sumber pemasukan negaranya (Bank).

worldometers.info/gdp/libya-gdp/

Gross Domestic Product (GDP) of Libya

Year	GDP Nominal (Current USD)	GDP Real (Inflation adj.)	GDP change	GDP per capita	Pop. change	Population
2017	\$38,107,728,083	\$46,627,921,660	26.68%	\$7,086	1.36 %	6,580,724
2016	\$26,221,660,076	\$36,808,842,613	-2.80%	\$5,670	1.15 %	6,492,162
2015	\$27,842,131,486	\$37,867,414,402	-8.86%	\$5,900	0.88 %	6,418,315
2014	\$41,142,722,414	\$41,549,552,060	-24.00%	\$6,531	0.66 %	6,362,037
2013	\$65,502,870,174	\$54,670,463,262	-13.60%	\$8,650	0.55 %	6,320,360
2012	\$81,873,662,519	\$63,275,999,127	123.14%	\$10,067	0.61 %	6,285,748
2011	\$34,699,395,524	\$28,357,141,373	-62.08%	\$4,539	0.80 %	6,247,439
2010	\$74,773,444,901	\$74,773,444,901	5.02%	\$12,065	1.04 %	6,197,663
2009	\$63,028,320,702	\$71,198,368,527	-0.79%	\$11,607	1.24 %	6,133,984
2008	\$87,140,405,361	\$71,765,417,108	2.67%	\$11,845	1.41 %	6,058,748

Table 4 Dinamika GDP Libya Sebelum dan Sesudah Qaddafi, Sources World Bank

Produksi minyak yang dihasilkan terus menurun dalam kurun 4 tahun terakhir dan hanya mencapai sekitar 0,38 juta barel per harinya pada tahun 2016. Ekonomi Libya benar benar menyusut sekitar 28% pada tahun 2016 (John, 2011). Jumlah pengangguran sebanyak 19.57% dari total penduduk dan sepertiga penduduk hidup dibawah garis kemiskinan. Banyak infrastruktur hancur dan air minum serta listrik sulit diakses oleh penduduk karena keterbatasan.

Kondisi kehidupan di Libya menjadi semakin memprihatinkan, akses terhadap air bersih, perumahan yang aman dan layanan medis telah menurun karena lebih banyak orang terlantar setelah perang (Mueller, 2015). Sekitar 2.5 juta orang tidak memiliki akses layanan kesehatan, konflik berkepanjangan berdampak pada ekonomi Libya dan kesejahteraan penduduk. Turunnya Qaddafi berpengaruh terhadap politik dan keamanan, gejala konflik berkepanjangan sangat mempengaruhi perekonomian negara. Kehancuran fasilitas produksi minyak yang rusak karena perang sipil juga menghambat produksi minyak di Libya, bahkan beberapa terpaksa untuk tutup. Tentu saja akan berdampak pada transaksi ekspor minyak Libya (Ali, 2013).

Agenda menjadikan Libya negara yang mandiri dari sosok pemimpin yang diktator tidak semudah apa yang diharapkan. Keinginan rakyat Libya untuk menegakan demokrasi dengan menggunakan pemerintahan yang baru, institusi baru, pemilu, ekonomi liberal tidak berjalan dengan baik dan justru sebaliknya. Bantuan yang di usung oleh AS untuk membantu menciptakan kestabilan politik dan ekonomi justru menjadikan kondisi Libya semakin buruk. Ketidakstabilan politik dan ekonomi sangat memicu kekacauan hingga semakin menambahkan pemberontak-pemberontak. Perang saudara pun tidak terhindari, kriminalitas di

dalam negara Libya semakin merajalela dan masing-masing kelompok berusaha bertahan hidup.

Perebutan kekuasaan antar suku menjadikan negara Libya runtuh dan berada dalam keterpurukan (Antonopoulos, 2015). Perperangan yang dilakukan secara terus menerus demi mengisi kursi pemerintahan menjadi penghambat proses perekonomian. Hal inilah yang membuat rakyat terpecah belah hingga saat ini dan tidak menemukan jalan tengah. Gelombang pemberontakan yang dilakukan rakyat tidak membawa titik terang, justru membawa kehancuran dan masalah baru bagi rakyat. Rakyat menjadi terancam didalam negaranya sendiri, kondisi ini tentunya akan berpengaruh terhadap keamanan dan geopolitik kawasan. Rakyat yang terus bergejolak membuat negara Libya menuju kegagalan (Britannica, 2020). Libya menjadi negara yang rapuh dan tidak stabil sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *Failed States* bahwa sebuah negara lemah akan dengan mudah berpotensi bergerak menuju ke kegagalan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Gerakan pemberontakan yang dilakukan Tunisia, Mesir, Yaman dan Bahrain menjadi sebuah peluang bagi Libya untuk menurunkan rezim Qaddafi yang sudah memimpin selama 42 tahun dengan sifat otoriter. Harapan rakyat melakukan aksi demonstrasi ini yaitu menurunkan rezim Qaddafi dan membuat Libya menjadi negara yang lebih sejahtera. Dengan semangat yang kuat rakyat akhirnya membunuh sang pemimpin. Namun, kenyataan berbanding terbalik dengan harapan. Keinginan rakyat untuk membawa perubahan tidak berjalan dengan lancar dan justru semakin memperkeruh keadaan. Kawasan Timur Tengah dan Afrika Selatan menjadi kawasan penting bagi AS karena sumber daya alam yang melimpah. Demonstrasi besar-besaran hingga memakan korban jiwa menjadi perhatian AS, berbagai bantuan dilakukan AS untuk menurunkan Qaddafi dari pemerintahannya. Intervensi kemanusiaan bukan fokus utama AS tetapi ada tujuan yang lebih penting yaitu SDA minyak bumi.

Setelah perang saudara yang terjadi pada tahun 2011 keadaan negara Libya menjadi semakin kacau balau, perang sipil antar rakyat Libya menjadi berkelanjutan. Analisis penelitian ini menggunakan teori *Failed States* dari Robert Rotberg. Penulis mendapat temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana teori *Failed States* memandang Libya sebagai negara yang menuju kegagalan. Kondisi Libya yang tidak stabil dari segi politik, keamanan hingga perekonomian tentu membuat stabilitas Libya lemah. Seperti yang dikatakan oleh Robert bahwa, negara lemah cenderung dengan mudah menuju kegagalan.

Dengan menggunakan sudut pandang teori *Failed States*, dapat diketahui bagaimana kondisi politik, perekonomian dan rakyat Libya.

Berdasarkan penjelasan diatas, pendekatan *Failed States* dinilai sesuai untuk menjelaskan bagaimana *Failed States* melihat Libya sebagai negara yang menuju kegagalan. Pembentukan pemerintahan yang baru, institusi, dan pemilu tidak berjalan dengan lancar di Libya setelah turunnya Qaddafi dari kepemimpinannya. Keinginan untuk mengubah sistem pemerintahan Qaddafi agar dapat menciptakan kestabilan politik, ekonomi dan keadilan justru menjadikan kondisi Libya semakin buruk. Sejak digulingkannya kepemimpinan Qaddafi, Libya mengalami kekosongan pemerintahan dan berupaya melakukan transisi politik. Tetapi yang terjadi setiap suku di Libya mengalami bentrok dan masing-masing suku berusaha untuk mengisi kekosongan pemerintah hingga menyebabkan perang saudara. Sulit untuk menemukan jalan tengah apabila perang saudara terus terjadi. Perekonomian mengalami kemerosotan setiap tahunnya, keadaan ini membuktikan bahwa AS gagal dalam membantu Libya mandiri.

Keadaan perekonomian yang terus menerus tidak stabil menjadikan Libya negara yang lemah. Seperti yang dikatakan oleh Robert Rotberg negara yang lemah cenderung lebih mudah runtuh dan menuju ke kegagalan. Dalam penjelasan sebelumnya sudah dipaparkan bahwa Libya masuk kedalam kategori negara gagal menurut Robert Rotberg. Dengan keadaan rakyat Libya saat ini dan dilihat melalui data yang ada, penulis berpendapat bahwa Libya adalah negara yang menuju ke kegagalan. Ketidakstabilan politik dan perang saudara yang tidak kunjung selesai akan membawa Libya kepada kegagalan yang sesungguhnya.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini berfokus pada keadaan perekonomian dan masyarakat Libya setelah kepemimpinan pada tahun 2010 hingga 2015. Dimana dalam penelitian ini mendapatkan keadaan ekonomi dan politik sebelum dan sesudah Qaddafi menjabat sebagai presiden dan bentuk intervensi Amerika Serikat di Libya. Apabila di tinjau lebih lanjut, dalam pemapran juga terdapat kegagalan Libya dalam menjalankan roda pemerintahan yang baru.

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan. Penulis menyari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang menyebabkan kesimpulan dari skripsi ini hanya didapat digunakan sebagai diskusi terkait Libya. Sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terkait bagaimana proses revolusi di negara Timur Tengah dan Afrika Utara pada saat Arab Spring. Sehingga dapat menjadi pembanding keberhasilan atau kegagalan yang terjadi karena Gerakan pemberontakan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadie, A. &. (2003). The Economic Costs of Conflict :A Case Study of the Basque Country. *The American Economic Review*, 113-132.
- Ali, I. (2013). Oil and economic development: Libya in the post-Gaddafi era. *Elsevier*, 5-7.
- Alloouche, Y. (2017). *6 years after the Arab Spring: Where is Libya now?* Middle East Monitor Perspectives.
- Altajuri, A. O. (1999). Qaddafi: Still a Dictator. *JSTOR*, 2-5.
- Anderson, L. (2011). Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences Between Tunisia, Egypt, and Libya. *Foreign Affairs*, 2-6.
- Antonopoulos, P. (2015). *Libya Better Off Without Gaddafi?* AMN NEWS.
- Ardiansyah, A. (2014). Libya Pasca Revolusi Kepemimpinan Muammar Qaddafi. *Journal Ilmiah*, 10.
- Ayub, Z. A. (2016). State of Libya. *Springer* , 4-7.
- Bahauddin, A. (2012). *Menyingkap Perjalanan Hidup Tokoh-tokoh Diktator kejam Dunia*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Bank, W. (t.thn.). *Libya GDP*. <https://www.worldometers.info/gdp/libya-gdp/>. Diambil kembali dari <https://www.worldometers.info/gdp/libya-gdp/>
- Bhardwaj, M. (2012). *Development of Conflict in Arab Spring Libya and Syria : From Revolution to Civil War*. United State.
- Blanchard, C. (2012). Libya: Transition and U.S Policy. *Congressional Research Service*.
- Blanchard, C. M. (2011). Libya: Background and U.S. Relations. *Congressional Research Service*, 7-9.
- Blanchard, C. M. (2018). LIBYA : Transition and U.S. Policy. *Cengressional Research Service*, 25-27.
- Boose, J. W. (2012). Democratization and Civil Society: Libya, Tunisia and the. *International Journal of Social Science and Humanity*, 3-5.
- Britannica. (2020). *LIBYA*. <https://www.britannica.com/place/Libya/Qaddafi-toppled-and-killed>.
- Britannica, E. (2020). *britannica.com*. Diambil kembali dari <https://www.britannica.com/place/Libya/Economy>: <https://www.britannica.com/place/Libya/Economy>
- Brockmeier, S. (2016). The Impact of the Libya Intervention Debates on Norms of Protection. *Global Society*, 15-18.
- Campbell, H. (2013). Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya. Dalam H. Campbell, *NATO in Libya as a Military Information Operation* (hal. 141-152). NYU Press.

- Campbell, H. G. (2012). *NATO's Failur in Libya: Lesson for Africa*. South Africa: Africa Institute of South Africa.
- Carothers, T. (2012). *Democracy Policy Under Obama : Revitalization or Retreat?* Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
- Chamberlain, D. P. (2016). Cheap Threats: Why the United States Sturggles to Coerce Weal States. Dalam D. Pfundstein, *The 2011 Libya Crisis* (hal. 123-147). United Stated: Georgetown University Press.
- Chesterman, S. (2011). "Leading from Behind": The Responsibility to Protect, the Obama Doctrine, and Humanitarian Intervention after Libya. *Cambridge University Press*, 6-9.
- Chigozie, C. F. (2013). NATO's 2011 intervention in Libya: Humanitarian intervention. *Net Journal*, 3-6.
- Chivvis, C. S. (2014). Libya After Qaddafi : Lesson and Implications for the Future. Dalam J. Martini, *Security After the War* (hal. 7-12). England: RAND Cooperation.
- Chivvis, C. S. (2014). *Libya After Qaddafi: Lessons and Implications for the Future*. England: Rand; Edition Unstated Edition.
- Clements, B. (2013). Public Opinion and Military Intervention: Afghanistan, Iraq and Libya. *Wiley Online Library*, 3-4.
- CNN. (2011). *CNN: Hillary Clinton 'Progress made in Libya'*. CNN in Youtube.
- Collier, P. (1999). Doing Well Out of War. *Conference on Economic Agendas in Civil Wars*, 1-3.
- Collier, P. (1999). Doing Well Out of War. *Conference on Economic Agendas in Civil Wars*, 26-28.
- consulting, E. (t.thn.). *Arab Spring In Libya: Crisis For The World Economy*. <https://www.eurionconsulting.com/libya-arab-spring/>.
- Craig Harris, L. (1986). *Libya Qaddafi's Revolutions and the Modern State*. Wesleyview Press.
- Daalder, I. H. (2012). NATO's Victory in Libya: The Right Way to Run an Intervention. *JSTOR*, 4-6.
- David Blundy, A. L. (1987). *Qaddafi and the Libyan Revolution*. Canada: Little Brown and Company.
- David Cameron, N. S. (2011). *The Bombing Continues until Qaddafi goes*. United State: The Times Report.
- Davis, D. I. (2011). *How Good is NATO after Libya*. United Stated: NATO WATCH.
- Dr. Ian Davis, D. (2011). How good is NATO after Libya? *NATO WATCH*, 1-4.
- Economic, T. (2020). *Libya Economic*. <https://tradingeconomics.com/libya/gdp>.
- Edward, R. (2015). After Qadhafi: Development and Democratization in Libya. *Academic Journal Article*, 2-5.

- El-Katiri. (2012). *State Building Challenges in A post Revolution Libya*. US Army College: Strategic Studies Institute.
- El-Khawas, M. A. (1989). Review: Libya's Foreign Policy Under Qaddafi. *Indiana University Press*, 121-126.
- Erdag, R. (2017). Libya in the Post-Revolutionary Era. *Springer Link*, 3-5.
- F.C, W. (1980). *Libyan Oil Industry*. United States: U.S Department of Energy.
- Fakih, M. (2000). *Muammar Qaddafi Menapak Jalan Revolusi*. Insistpress: Yogyakarta.
- Farley. (1971). Planning for Development in Libya, in tge Exceptional Economy in the Developing World. *Preager Publisher*.
- Farrel, T. (2012). *Humanitarian Intervention and Peace Operations*. New York: Oxford University Press.
- Forscey, D. (2016). Country Brief : Libya. *Jstor*, 4-6.
- Foundation, T. H. (2019). *2019 Index of Economic Freedom*. Diambil kembali dari <https://www.heritage.org/index/country/libya>: <https://www.heritage.org/index/country/libya>
- Fukuyama, F. (2006). *America at the Crossroads: Democracy, Power and Neoconservative Legacy*. Yale University Press.
- Garland, L. (2012). *2011 Libyan Civil War*. White Word Publications.
- Gaub, F. (2011). Libya: Avoiding State Failure. *Research Report*, 1-6.
- Glanville, L. (2013). Intervention in Libya: From Sovereign Consent to Regional Consent. *International Studies Perspectives*, 5-7.
- Gosa, K. (2013). From normalization of relations to war: United States - Libya relations 2001-2011. *College of Liberal Arts & Social*, 52-56.
- Green, M. (2019). To What Extent Was the NATO Intervention in Libya a Humanitarian Intervention? *E-International Relations Students*, 1-4.
- Guillermo O'Donnel, P. S. (t.thn.). Transisi Menuju Demokrasi. *LP3ES*.
- Gwaambuka, T. (2016). *Ten Reasons Libya Under Gaddafi Was a Great Place to Live*. The African Exponent. Diambil kembali dari <https://www.africanexponent.com/post/ten-reasons-libya-under-gaddafi-was-a-great-place-to-live-2746>.
- Harris, C. (t.thn.). Libya Qadhafi's Revolution and the Modern State. *Wesyview Press*, 127.
- Hinnebusch, R. A. (1984). Charisma, Revolution and State Formation: Qaddafi and Libya. *Taylor and Francis*, 59-62.
- Hobson, C. (2016). Responding to Failure: The Responsibility to Protect after Libya. *SAGE journals*, 2-3.
- House, T. O. (2011). *President Obama's Statement on Libya*. United State: The Obama White House.

- Ikechukwu, A. (2013). NATO's 2011 intervention in Libya: Beyond Humanitarian Intervention. *Net Journal of Sosial Sciences*, 5-9.
- Jazeera, A. (2011). *Profile : Muammar Qaddafi*.
<https://www.aljazeera.com/indepth/2011/02/201122117565923629.html>,.
- John, R. B. (2011). *Libya Continuity and Change Second Edition*. New York: Taylor and Francis Group.
- Joy, A. (2011). The Crisis in Libya. *ORF Issues Brief*.
- July, R. W. (1970). *A History of the African People*. United States.
- Kailani-Chariat, E. E. (2017). Libya: Oil and the Discontents of Emerging Civil Society. *Springer Link*, 8-10.
- Kardas, S. (2001). Humanitarian Intervention : The Evolution Of The Idea And Practice. *Journal Of International Affairs*, 4-6.
- Karim Mezran, E. M. (2017). Libya : From Intervention to Proxy War. *Jstor*, 2-4.
- KBRI TRIPOLI, L. (2009). *Keterangan dasar Jamahiriya Arab Libya Sosialis Raya*. Libya: KBRI LIBYA.
- KBRI, L. (2015, November 21). *Informasi Bisnis Negara Libya*. Diambil kembali dari kemlu.go.id:
<https://www.kemlu.go.id/tripoli/id/Pages/Informasi%20Bisnis%20Negara%20Libya.aspx>,
- Khader B, E.-W. (t.thn.). The Economic Development of Libya. *U.S Department of Energy*, 6-8.
- Kuperman, A. (2015). Obama's Libya Debacle: How a Well-Meaning Intervention Ended in Failure. *JSTOR*, 6-8.
- Kuperman, A. J. (2013). A Model Humanitarian Intervention? Reassessing NATO's Libya Campaign. *Jstor*, 2-6.
- Kuperman, A. J. (2014). NATO's Intervention in Libya: A Humanitarian Success? *Springer Link*, 10-11.
- Laremont, R. R. (2013). After the Fall of Qaddafi: Political, Economic, and Security Consequences for Libya, Mali, Niger, and Algeria. *Stability International Journal of Security & development*, 2-4.
- Libya, C. B. (2002). *Economic Bulletin*. Tripoli Libya: Research and Statistics Annual Report.
- Libya, K. T. (2009). *Keterangan Dasar, Jamahiriya Arab Libya Sosialis Raya*. LIBYA: Kedutaan Besar Republik Indonesia in Libya.
- Lisa, A. (2009). Muammar al-Qaddafi : The "King" of Libya. *Journal of International Affairs*, 3-6.
- Lockwood, A. N. (2014). Modern Libya: A Study in Political Development. *American Political Science Review*, 8-10.

- Lynch, M. (2014). *The Arab Uprisings Explained: New Contentious Politics in the Middle East*. Columbia University Press.
- Lynch, M. (2016). *THE ARAB UPRISINGS EXPLAINED : NEW CONTENTIOUS POLITICS IN THE MIDDLE EAST*. New York: Columbia University Press.
- Mansour, F. (2000). *Muammar Qaddafi Menapak Jalan Revolusi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Marston, R. (2011). *Libya's key challenges for economic stability*. United Kingdom: BBC NEWS.
- Martinez, L. (2010). *Libya. Dalam Middle East*. CQ Press.
- Martinez, L. (2015). Oil, violence and international actors: the case of Libya. *Canadian Journal of African Studies*, 4-6.
- Masoed, N. (2014). Libya's Economic Growth: Past Recent and Near Future. *ResearchGate*, 6-8.
- Masoud, N. (2013). A Review of Libyan's Economy, Structural Changes and Development Patterns. *ResearchGate*, 4-5.
- Masoud, N. (2013). A Review of Libyan's Economy, Structural Changes and Development Patterns. *Research Gate*, 2-5.
- Masoud, N. M. (2013). A Review of Libyan's Economy, Structural Changes and Development. *Business and Economics Journal*, 4-6.
- McDermott, A. (1973). Qaddafi and Libya. *JSTOR*, 39-41.
- Michaels, J. H. (2013). The NATO Intervention in Libya. *Taylor and Francis Group*, 8-9.
- Mohsin Khan, K. M. (2013). The Libyan Economy after the Revolution: Still No Clear Vision. *The Rafik Hariri Center for the Middle East*, 8-10.
- Moore, R. R. (2007). *NATO's new mission : projecting stability in a post-Cold War world (Praeger Security International)* . Praeger Publishers.
- Mueller, K. P. (2015). Precision and Purpose: Airpower in the Libyan Civil War. *Rand Corporation*, 10-12.
- NATO. (t.thn.). *Nato Otan*. Diambil kembali dari <https://www.nato.int/nato-welcome/>.
- News, A. (2012). *Hillary Clinton Takes Responsibility for Libya Security Failures in Embassy Attack*. ABC News in Youtube.
- Nmoma, V. (2009). POWER AND FORCE: LIBYA'S RELATIONS WITH THE UNITED STATES. *University Press of Florida*, 1-4.
- Okey Oji, R. A. (2016). Neoliberal democratic reforms in post-gaddafi era: implications for political stability in libya, 2011-2016. *Journal of Social Science Research* , 4-6.
- Otman, W. (2007). *The Libyan Economy*. Springer.
- Parekh, B. (1997). The Dilemmas of Humanitarian Intervention: Introduction. *SAGE Journals*, 2-5.

- Pattison, J. (2011). The Ethics of Humanitarian Intervention in Libya. *Cambridge University Press*, 12-15.
- Plecher, H. (2020). *Libya: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1984 to 2021*. <https://www.statista.com/statistics/455600/gross-domestic-product-gdp-in-libya/>.
- Randall, E. (2015). *After Qadhafi: Development and Democratization in Libya*. 18-21: Middle East Institute.
- Ricardo, D. A. (2011). *Khadafi Jagoan Tanah Arab*. Jakarta Pusat: Arus Timur.
- Ricardo, D. A. (2011). *Khadafi Jagoan Tanah Arab*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Ricardo, R. (2013). After the Fall of Qaddafi: Political, Economic, and Security Consequences for Libya, Mali, Niger, and Algeria. *Stability International Journal of Security & Development*, 5-8.
- Rotberg, R. (2003). When States Fail. Dalam R. Rotberg, *The Failure of Nation State* (hal. 3-4). New Jersey: Princenton University Press.
- Rotberg, R. (2003). When States Failed. Dalam R. I. Rotberg, *Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators* (hal. 5-7).
- Sahide, A. (2017). *Gejolak Politik Timur Tengah (Dinamika, Konflik dan Harapan)*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Workpress.
- Sawani, Y. M. (2012). Post-Qadhafi Libya: interactive dynamics and the political future. *Taylor and Francis Online*, 4-6.
- Schumacher, E. (2014). The United States and Libya . *Foreign Affarirs*, 3-5.
- Serwer, D. (2011). Post-Qaddafi Instability in Libya. *Jstor*, 3-6.
- Sihbudi, R. (1998). *Perlawanan Negara-negara Timur Tengah terhadap Dominasi Politik Amerika*.
- Soeratman, D. (2012). *Sejarah Afrika*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Springborg, R. (2011). The Political Economy of the Arab. *The Political Economy of the Arab*, 4-6.
- Stankovska, E. (2011). Libyan Oil-Before and After Moammar Gaddafi. *Civil Military Fusion Centre*, 4-7.
- State, U. D. (2013, January). *Remarks at the International Conference on Libya*. Diambil kembali dari <https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/03/159283.htm>: <https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/03/159283.htm>
- Stiftung, B. (2009). BTI 2010 - Libya Country . *Gutersloh*, 8-12.
- Stuenkel, O. (2015). The Impact of the Libya Intervention Debates on Norms of Protection. *Taylor and G=Francis Online*, 4-6.

- Sullivan, K. L. (2008). *Muammar al-Qaddafi Libya (Dictatorships)*. United States: Twenty First Century Books.
- Tambaruka, A. (2011). *Revolusi Timur Tengah Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*. Yogyakarta: Narasi.
- Turkia, M. (2016). *Libya since the 'Arab Spring': 7 ways human rights are under attack*. London: Amnesty International.
- Ulfstein, G. (2013). THE LEGALITY OF THE NATO BOMBING IN LIBYA. *Cambridge University Press*, 2-4.
- Vandewalle, D. (2006). *History Of Modern Libya*. New York: Cambridge University Press.
- Vandewalle, D. (2012). After Qaddafi: The Surprising Success of the New Libya. *Jstor*, 8-15.
- WorldBank. (2017, Desember 17). *Economic Outlook*. Diambil kembali dari world bank:
<http://www.worldbank.org/en/country/libya/publication/economic-outlook-april-2017>,
- WorldBank. (2020). *GDP (current US\$) - Libya*.
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=LY&start=2018&view=bar>.
- Yon Machmudi, R. H. (2016). *Sejarah Timur Tengah Kontemporer*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Yon Machmudi, R. H. (2016). *Sejarah Timur Tengah Kontemporer: Kepemimpinan di Arab Saudi dan Libya*. Jakarta: UI Press.